BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN tesebut merupakan bagian dari *Website www.bkkbn.go.id* yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan Sosialisasi Program Keluarga Berencana Nasional di Jawa Barat merupakan suatu pemahaman yang diperoleh dari penyelidikan dari sebuah tindakan/keputusan yang sebenarnya dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Analisa menghasilkan informasi dan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan dari hasil kerja pemerintahan yang berbasis *elektronik* di Provinsi Jawa Barat. Menyelidiki penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Jawa Barat, dapat dilihat dari beberapa indikator. Adapun indikator tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya tentang penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN meliputi kondisi data infrastruktur, ketersediaan dasar hukum, koordinasi antar instansi, ketersediaan aparatur, ketersediaan sarana teknologi dan strategi pemikiran pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat .

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

4.1 Kondisi Data Infrastruktur Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana.

Kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB sangat diperlukan, hal tersebut merupakan sebuah dasar yang menjadi tujuan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN tersebut, untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketersediaan manajemen sistem, adanya dokumentasi, ketersediaan data yang berkualitas dan menjaga keamanan data dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN agar sosialisasi KB di Jawa Barat dapat tersosialisasi dengan baik. Indikator-indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Ketersediaan Manajemen Sistem Yang Mendukung Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana.

Ketersediaan manajemen sistem sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN

untuk mengetahui bagaimana ketersediaan manajemen sistem dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN bagian dari *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN dapat dilihat melalui (1)Adanya ketegasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN ; (2)Adanya ketetapan prosedur kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN ; (3)Adanya penyusunan anggaran untuk kegiatan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN ; (4)Adanya ketetapan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN .

Pertama, ketegasan dalam menentukan tujuan, diperlukan karena dengan adanya ketegasan dalam menentukan tujuan dalam penerapan *E-Government,* kita akan dapat lebih mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN tersebut. Adanya ketegasan dalam menentukan tujuan tersebut secara terperinci dapat diketahui hal apa saja yang menjadi dasar dalam membentuk SSIM-PKBN yang ada dalam sebuah *website* *www.bkkbn.go.id*. Berdasarkan hasil pemaparan diatas, penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN mempunyai ketegasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai yaitu tersosialisasikanya program KB di Jawa Barat.

Paradigma pembangunan di Indonesia sejak awal reformasi mengalami banyak perubahan. Perubahan yang paling mendasar adalah berubahnya sistem pembangunan dari yang bernuansa sentralistik menjadi desentralistik. Pada saat era Orde Baru memegang kekuasaan, peran pemerintah pusat menjadi sangat menentukan di seluruh

sektor pembangunan, akan tetapi pada era desentralisasi saat ini, peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat dominan. Perubahan lingkungan strategis tersebut merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan *good-governance*.

Mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut pengelolaan program KB nasional perlu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yaitu dengan melakukan perubahan mendasar melalui perubahan *mindset,* manajemen dan strategi penggarapan program.

Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam sebuah *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB mempunyai tujuan sebagai pusat layanan informasi yang cepat dan akurat tentang keluarga berencana yang berguna bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat maupun aparatur di BKKBN itu sendiri. Tujuan tersebut sesuai dengan INPRES No. 3 tahun 2003, tentang Pendayagunaan teknologi informasi adalah modal dasar BKKBN melaksanakan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam sebuah *website* *www.bkkbn.go.id* BKKBN Provinsi Jawa Barat. Pembentukan *website* *www.bkkbn.go.id* diharapkan dapat menyatukan persepsi di kalangan Masyarakat Jawa Barat akan pentingnya mengikuti program KB guna mengatur jumlah penduduk dan menjadi manusia yang lebih berkualitas, selain itu SSIM-PKBN yang ada dalam sebuah *website* *www.bkkbn.go.id* merupakan wujud dari pemerintahan yang berbasis *elektronik* di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN memiliki kejelasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai, adapun kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam sebuah *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN adalah berdasarkan SK Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada pasal 43 Kepres 103/2001 tersebut ditetapkan bahwa BKKBN mempunyai peran sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan SSIM-PKBN yang ada dalam sebuah *website* *www.bkkbn.go.id* yang diharapkan dapat menerapkan sistem informasi yang *up to date* merupakan salah satu dari dua puluh satu sasaran yang ditetapkan dalam melakukan perubahan pengelolaan program KB saat ini. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan informasi di lingkungan BKKBN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program dalam menyediakan data dan informasi program KB nasional. Data dan informasi tersebut digunakan selain sebagai data operasional bagi masing-masing daerah lebih jauh lagi digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan, pengelola dan pelaksana program dalam pengambilan keputusan, perumusan dan penetapan kebijakan serta pelaksanaan program di seluruh tingkatan wilayah program KB Nasional.

Data dan informasi yang disampaikan melalui berbagai laporan banyak dipengaruhi oleh kualitas data dan informasi yang dihasilkan *(output).* Kualitas data dan informasi sebagai hasil dari suatu proses pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB Nasional, salah satunya adalah tergantung dari kualitas masukan *(input)* sebagai bahan baku dalam proses sebuah sistem, oleh karena itu untuk menghasilkan kualitas data yang diharapkan perlu dengan cermat memperhatikan mekanisme pengelolaan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Kegiatan yang di lakukan oleh BKKBN dalam meningkatkan pelayanan KB kepada masyarakat maka dibentuklah SSIM-PKBN sebagai pusat layanan infomasi cepat dan akurat tentang Program KB di Jawa Barat yang berbasis *elektronik* yang dapat berguna bagi masyarakat, dengan adanya penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* masyarakat serta aparatur di BKKBN akan semakin mudah dalam mencari informasi yang berhubungan dengan Program KB serta informasi tentang kegiatan apa saja yang di lakukan oleh BKKBN dalam mensosialisasikan KB. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti bahwa untuk mengetahui informasi tentang KB masyarakat tinggal mengakses *website* *www.bkkbn.go.id*, karna semua informasi yang di dapat di lapangan sering langsung di *up date* ke *website www.bkkbn.go.id.*.

Kedua, ketetapan prosedur kegiatan serta biaya diperlukan sebagai sebuah acuan dalam bekerja, adapun biaya yang diperlukan dimaksudkan untuk mengukur biaya yang dibutuhkan. Idealnya biaya tersebut harus dapat sesuai dengan kebutuhan.

Biaya yang diperlukan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN cukup besar. Sehingga diperlukan sebuah rincian biaya yang jelas, hal tersebut dikarenakan penerapan *E-Government* merupakan hal yang baru di dalam institusi pemerintahan.

Ketetapan prosedur kegiatan yang mendukung penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* dalam meningkatkan sosialisasi KB di BKKBN belum dikelola dengan baik. Berdasarkan laporan hasil survei yang di lakukan oleh petugas lapangan terkendala dengan proses *updating* data yang di lakukan petugas bagian lapangan mulai dari tingkat desa sampai Provinsi. Seringnya terlambat data yang di kirim dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota menjadi penyebab terhambatnya proses *updating* data mengenai KB. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN ketetapan prosedur kegiatan belum dapat berjalan secara optimal hal tersebut disebabkan karena di BKKBN meskipun teknologi sudah maju akan tetapi sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dalam penerapan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Ketiga, adanya penyusunan anggaran untuk kegiatan. Penyusunan anggaran dalam sebuah kegiatan dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN, dalam penyusunan anggaran hendaknya dilakukan oleh orang

yang ahli dalam menyusun anggaran, hal ini dimaksudkan agar lebih meminimalkan kesalahan dalam penyusunan anggaran.

Awal era desentralisasi komitmen terhadap Program KB Nasional, memang merosot tajam, dari tingkat Pusat s.d Desa. Banyak kabupaten/kota, program ini hanya ditampung dalam suatu lembaga yang digabung dengan berbagai bidang lain dengan tupoksi yang beragam, bahkan di beberapa kabupaten/kota di pilah-pilah ke berbagai instansi, personil yang didistribusikan ke berbagai dinas/instansi, petugas lapangan KB yang kocar-kacir, dengan dukungan operasional yang minim, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sementara tingkat provinsi tidak lagi mampu berbuat banyak, karena tidak ada lagi hubungan organisasi antara BKKBN dan lembaga Pengelola KB Kabupaten/Kota.

Secara berangsur keadaan semakin membaik di tingkat Provinsi, komitmen Pemda, lembaga legislatif, maupun berbagai pihak terkait, kembali menguat. Bahkan KB merupakan salah satu *focus* dari Misi I Pembangunan Jawa Barat : *Meningkatkan kualitas dan produktifitas, disamping Pendidikan dan Kesehatan*, sehingga menjadi salah satu acuan penyelenggaraan Program KB Nasional yang menyatu dengan pembangunan daerah. Sedangkan dukungan APBD Jawa Barat sampai dengan tahun 2009, cukup besar, bila dibandingkan dengan provinsi lain.

Penyusunan anggaran dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dilakukan oleh BKKBN pusat dengan anggaran yang ada jauh dari mencukupi, anggaran yang di perlukan mulai dari tingkat RT/RW yakni sebesar Rp. 273 miliar sedangkan anggaran yang ada berkisar Rp. 5.6

miliar ini menurut penghitungan yang di lakukan oleh biro statistik. Anggaran BKKBN Jawa Barat tahun 2009 adalah sebesar 39 milyar, bila di bandingakn dengan BKKBN Jawa Tengah dan Jawa Timur, anggaran mereka berkisar sekitar 41 milyar,. Anggaran BKKBN Jawa Barat yang bersumber dari APBN dan jumlahnya amat terbatas ini. Anggaran BKKBN tahun 2009 mengacu pada ketentuan UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta peraturan menteri keuangan RI No 134/ PMK.06/ 2005 tahun 2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

Sebagian besar anggaran dari APBD tersebut di distribusikan kembali ke seluruh kabupaten/kota di Jawa barat. Walaupun anggaran Jawa Barat selalu lebih kecil dibanding Jawa Tengah maupun Jawa Timur, ternyata berdasarkan hasil Susenas 2007 s.d 2009 (th 2010 belum keluar), urutan prosentase kesertaan berKB pasangan usia subur di Jawa Barat meningkat terus di tingkat nasional, dari ranking 11,10, dan 9. Bahkan dengan kesertaan berKB tahun 2009 sebesar 62, 88 %, Jawa Barat menduduki urutan teratas di Pulau Jawa, suatu pencapaian yang belum pernah terjadi sejak program KB dicanangkan di tahun 1970.

Adapun biaya awal yang diperlukan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN meliputi hanya untuk penyediaan sarana teknologi sajah yakni berupa komputer dan perlengkapannya.

Tabel 4.1
Anggaran Pembentukan dan Pemeliharaan SSIM-PKBN
di Provinsi Jawa Barat

NO	DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN	SEBESAR
1.	Jasa konsultan tentang perancangan penyediaan sistem yang akan digunakan	Rp.50.000.000,00
2.	Pembelian alat yang akan digunakan komputer printer	Rp.500.000.000,00
3.	Biaya pemeliharaan dan pengelolaan data	Rp.100.000.000,00
Jumlah biaya yang dibutuhkan		Rp.650.000.000,00

(Sumber: Bagian Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program BKKBN Provinsi Jawa Barat Tahun 2010)

Jika dilihat biaya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, adapun yang menyusun biaya tersebut adalah Bidang IKAP sebagai pengelola SSIM-PKBN secara teknik dan non teknik. Penyusunan anggaran dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN belum efektif hal ini disebabkan tidak adanya lembaga yang profesional yang mengelola baik secara teknik dan non teknis segala sesuatu yang berhubungan dengan SSIM-PKBN karena masih di pegang BKKBN pusat.

Keempat, adanya ketetapan merupakan suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok/pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, tersebut digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hal tersebut dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN mempunyai ketetapan guna mencapai suatu tujuan yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik, adapun dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN meliputi:

1. Instruksi Presiden No.6 2001 tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
2. Instruksi Presiden No.3 2003 tentang dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Kegiatan SSIM-PKBN di Provinsi Jawa Barat dengan adanya ketetapan tersebut, terdapat ketetapan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN, untuk menentukan arah ke depan agar sosialisasi KB di Jawa Barat dapat tersosialisasi sampai Pelosok desa dimana *Internet* sekarang ini sudah sampai ke setiap wilayah Nusantara.

Ketersediaan manajemen sistem sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN. Berdasarkan hasil uraian tentang indikator-indikator ketersediaan manajemen sistem di atas dapat dilihat dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN memiliki ketetapan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai pusat layanan informasi yang cepat dan akurat tentang Program KB yang berbasis *elektornik.*

Selanjutnya pengumpulan, pengolahan, analisis, penyebarluasan dan penyajian data dan informasi serta pendokumentasian merupakan rangkaian mekanisme dari proses pengelolaan Sistem Informasi Manajemen yang menghasilkan berupa data dan informasi program KB nasional. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional baik oleh para pengelola dan pelaksana program di masing-masing Kabupaten/ Kota maupun oleh unsur pimpinan, banyak tergantung kepada upaya

pemanfaatan secara optimal untuk kepentingan program di seluruh jajaran wilayah program KB nasional.

Ketetapan prosedur kegiatan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN belum dapat berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena kesisteman yang ada di BKKBN tidak selamanya berjalan lancar seringnya sistem yang *eror* dan *website* tersebut susah untuk di akses bahkan sama sekali tidak bisa untuk dibuka, Khususnya *website* BKKBN Provinsi yang masih di benahi. Berbeda dengan *website* BKKBN pusat yang sudah bisa dikatakan tidak mendapatkan Problem yang berarti. Selain itu proses penyusunan anggaran di dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN belum ditangani secara baik dan masih terdapat ketimpang tindihan dalam melaksanakan tugas juga belum memiliki aturan yang lebih teknis untuk menerapkan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* karena masih bergantung dari BKKBN pusat.

4.1.2 Adanya Dokumentasi Yang Mendukung Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana.

Pelaporan Program KB nasional saat ini tidak saja dilakukan melalui sistem yang manual dalam bentuk laporan kertas akan tetapi saat ini telah disediakan sistem aplikasi berbasis *web* melalui *Website bkkbn.go.id* yang didesain untuk memudahkan untuk mencari informasi tentang KB. Para pengguna khususnya bagi para pengelola

data dan informasi program KB nasional. Media ini cukup strategis apabila dimanfaatkan secara optimal untuk penyediaan data dan informasi yang dapat membantu kemudahan para pimpinan, pengelola pelaksana program dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan program KB nasional.

Hambatan yang di hadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kualitas sumber daya manusia yang seluruhnya belum dapat menggunakan secara optimal teknologi ini, akan tetapi permasalahan ini harus segera dapat diatasi dengan memulai dari tiap aparatur BKKBN itu sendiri untuk menggunakan teknologi ini, agar kemajuan dan perkembangan teknologi yang demikian cepat dapat diikuti dan dimanfaatkan guna lebih mengefektifkan serta mengefisienkan seluruh kegiatan pengelolaan program KB nasional, sehingga secara perlahan dapat dirasakan peningkatan kecepatan dalam penyelesaian tugas-tugas sehari-hari. Hambatan lainnya adalah, kondisi minat baca, khususnya para pengelola program dirasakan relatif masih rendah, oleh karena itu perlu di tingkatkan minat baca para petugas lapangan BKKBN Provinsi Jawa barat.

Kondisi di lapangan dapat di lihat, baik sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta kesiapan infrastrukur yang ada, maka perlu meningkatkan koordinasi dengan semua komponen dan sektor terkait. Secara optimis, pelayanan informasi dan dokumentasi program KB nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program KB nasional dapat terlaksana dengan baik.

Harapan yang ingin dicapai dari semua kegiatan ini adalah memberikan suatu pencerahan dalam menata dan meningkatkan kemampuan jajaran Pengelola Program KB Nasional, sehingga pada gilirannya semua pihak akan dapat memanfaatkan data Program KB Nasional sebagai sumber data dan informasi tentang KB dan program KB Nasional juga berpengaruh terhadap pembangunan dalam segala aspek.

Dokumentasi sangat diperlukan dalam penerapan *E-government* melaui SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id, hal ini sangat membantu dalam proses perumusan masalah yang ada dalam sosialisasi KB. Dokumentasi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan. Proses dokumentasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Adanya alat yang mendukung dalam proses dokumentasi (2) Adanya tempat untuk menyimpan dokumentasi (3) Adanya evaluasi data. Proses dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dokumentasi tersebut digunakan.

Pertama, alat yang digunakan dalam dokumentasi, dalam melakukan dokumentasi diperlukan alat untuk mendukung dokumentasi tersebut. Alat yang digunakan hendaklah menggunakan alat yang memang dikhususkan untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bisa berupa tulisan ataupun gambar-gambar atau berupa data informasi *elektronik.* Sejalan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dokumentasi dapat berbentuk *audio visual*. Alat yang di gunakan beragam dalam dokumentasi tersebut kita tinggal memilih alat apa yang cocok untuk proses dokumentasi yang akan kita buat. Alat yang sering di gunakan oleh BKKBN dalam membuat Dokumentasi yakni berupa *camera digital*, *handycam*,

tape recorder, dan dokumentasi tertulis juga masih sering di gunakan dengan alasan takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi pada alat elektronik tersebut.

Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN berdasarkan hasil wawancara alat yang digunakan dalam proses dokumentasi tersebut berupa *camera digital, handycam, tape recorder* dan komputer demi menunjang dalam pedokumentasian BKKBN memeberikan fasilitas yakni satu staf pegawai diberikan satu unit komputer. Alat tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan, jika dilihat dari pegawai khususnya yang mengelola SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id*. Jumlah alat yang mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN sudah dapat dikatakan memadai. Idealnya seperti *Camera digital* dan *handycam*, masing-masing memiliki dua unit untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan seperti rusak dan hilang.

Kedua, tempat penyimpanan dokumentasi. Penyimpanan dokumentasi sangat diperlukan, hal ini dapat membantu dalam proses pencarian data agar lebih mudah jika di tata dengan baik, dalam membuat tempat penyimpanan data hendaklah disesuaikan dengan bentuk dokumentasi yang telah dibuat, dengan demikian dokumentasi tersebut akan tersusun rapi dan akan lebih memudahkan kita dalam mencari data yang diperlukan. Idealnya tempat penyimpanan dokumentasi tersebut di dalam sebuah CD dan arsip kertas juga masih di gunakan karena takut terjadi gangguan dengan komputer yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Dokumentasi dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN disimpan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dokumentasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bentuk *backup CD* dan dan arsip kertas masih digunakan. Tempat yang digunakan dalam menyimpan dokumentasi berupa laporan-laporan tersebut menggunakan *locker*. Jumlah *locker* yang tersedia belum mencukupi, hal tersebut dapat terlihat dengan masih disatukannya data-data dari setiap Kabupaten/kota sehingga masih ada data-data yang tidak tersusun rapi. Idealnya jumlah tempat penyimpanan data seperti *locker* harus sesuai dengan jumlah data yang ada yang ada di BKKBN sehingga akan lebih memudahkan dalam mencari data dari lapangan yang masuk ke BKKBN .

Bentuk lain dalam menyimpan dokumentasi berupa *software-software* instalasi serta gambar *audio visual* dalam bentuk *compact disk*. Tempat yang digunakan untuk menyimpan dokumentasi tersebut berupa *softcase* sehingga mudah dibawa-bawa sehingga memudahkan untuk mencari data dokumentasi tersebut. Bidang IKAP BKKBN belum memiliki tempat untuk menyimpan *software-software* tersebut. Keadaan ini dapat menyebabkan dokumentasi dalam bentuk *compact disk* berserakan. Dokumentasi sosilaisasi KB yang diselenggarakan oleh BKKBN langsung di *upload* ke *website www.bkkbn.go.id,* sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui sosilaisasi KB yang telah dilakukan oleh BKKBN.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah disediakan fasilitas jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengelola Program KB Nasional di setiap tingkatan. Fasilititas-fasilitas yang telah tersedia dan

dapat dimanfaatkan saat ini antara lain *Website*, *E-mail, Video Conference* dan *Web Meeting* yang dapat dimanfaatkan tidak saja oleh para petugas BKKBN Pusat dan Provinsi melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh Petugas, Pengelola, Mitra Kerja serta masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang KB yang berada di setiap tingkatan wilayah, bahkan dalam waktu dekat juga akan dilakukan melalui pemanfaatan mobil unit pelayanan dan mobil unit penerangan sebagai salah satu fasilitas yang dapat menjangkau masyarakat di daerah pedalaman.

Fasilitas yang telah tersedia ini memang pada saat ini masih banyak dimanfaatkan oleh para petugas di tingkat Provinsi sehingga dalam penyajiannya belum banyak memberikan kontribusi terhadap promosi produk-produk kegiatan yang dilakukan oleh setiap daerah baik tingkat kecamatan, desa maupun masyarakat luas. *Website* *www.bkkbn.go.id* sebagai salah satu media informasi publik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi atau promosi setiap produk kegiatan baik yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mempercepat pencapaian program pembangunan di setiap daerah.

Pelayanan program data dan informasi memegang peranan penting untuk menyamakan persepsi dalam memperkuat pelaksanaan sosialisasi program KB nasional dan program pembangunan di masing-masing Kabupaten/ Kota. Sisi lain dari sistem informasi manajemen program KB yang menyangkut sub sistem pencatatan pelaporan yang semula bersifat manual ternyata banyak mengalami hambatan terutama dalam hal kualitas data, sehingga diharapkan dengan berbasis teknologi informasi selain akan meningkatkan wawasan juga akan memacu kinerja

para petugas dan pengelola program KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sub sistem informasi manajemen pencatatan pelaporan program KB nasional saat ini tidak saja dilakukan melalui sistem yang manual dalam bentuk laporan kertas akan tetapi saat ini telah disediakan sistem aplikasi berbasis *web* melalui *website www.bkkbn.go.id* yang didesain untuk memudahkan para pengguna khususnya bagi para pengelola data dan informasi program KB nasional. Media ini cukup strategis apabila dimanfaatkan secara optimal untuk penyediaan data dan informasi yang dapat membantu kemudahan para pimpinan, pengelola dan pelaksana program dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan program KB nasional.

Minimnya kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penghambat pemanfaatan teknologi informasi. Aparatur BKKBN belum seluruhnya dapat menggunakan teknologi secara optimal. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh BKKBN. Penerapan teknologi yang mengikuti pekembangan kemajuan jaman dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan serta mengefisienkan seluruh kegiatan pengelolaan program KB yang ada di Jawa Barat. Sehingga secara perlahan penerapan teknologi dapat meningkatan percepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari yang dibebankan kepada BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Idealnya disediakan sebuah *locker* untuk menyimpan dokumentasi yang berbentu laporan-laporan tertulis. Dokumentasi yang berbentuk *compact disk* disimpan dalam sebuah lemari yang dapat terlihat dan disusun secara rapi, sehingga jika diperlukan tinggal mengambil dari lemari tersebut dan menyimpannya kembali

jika sudah dipergunakan. BKKBN belum memiliki ruangan khusus untuk menyimpan dokumentasi. Faktor penghambat untuk menjaga keamanan dan kerapihan data dokumentasi yang terkumpul merupakan satu hal yang harus dihadapi BKKBN Jawa Barat. Dokumentasi yang letaknya tidak teratur akan menyebabkan aparatur BKKBN membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian dokumentasi jika dibutuhkan. Kondisi ini tidak mencerminkan efisiensi waktu dalam pelaksanaan kerja.

Ketiga, adanya evaluasi data yaitu data perlu dievaluasi, hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dalam memberikan informasi. Evaluasi data tersebut dilakukan agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Evaluasi data selain dapat mengetahui data apa saja yang kurang, evaluasi data juga dapat digunakan sebagai sebuah penilaian dari beberapa Kecamatan atau Kabupaten/Kota dalam memberikan data. Penilaian disini diartikan bahwa sejauh mana Kecamatan atau Kabupaten/Kota tersebut dapat memberikan sebuah data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dijadikan sebuah informasi ke dalam SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id agar dapat mengukur tingkat disiplin pegawai yang ada di tingkat daerah dalam mematuhi peraturan yang telah di tentukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi data bertujuan agar dapat memberikan informasi yang *up to date* dan sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan data menjadi informasi dilakukan rutin setiap hari dalam SSIM-PKBN. Cara yang digunakan untuk mengevaluasi data dalam SSIM-PKBN berdasarkan standar operasional prosedur. Penilaian standar operasional prosedur meliputi pemeriksaan *input* data, penggunaan

anggaran, penerapan teknologi hingga pemeriksaan *output* data. Informasi yang dimasukkan ke dalam SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* merupakan masukan informasi Evaluasi penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data dan informasi sebagai indikator yang dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB nasional yang bersumber dari berbagai penyedia data dari mulai tingkatan pengelola data pada tingkat yang terendah RT sampai dengan tingkat Pusat menyajikan data hasil pelaksanaan program KB nasional secara berkala. Penyediaan data mikro keluarga sebagai data basis operasional Program KB yang sampai saat ini dihimpun melalui formulir R/I/KS secara bertahap mulai dialihkan dengan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi.

Hasil kegiatan Program KB Nasional yang dilaporkan setiap bulan dari setiap tingkatan wilayah sampai saat ini telah berjalan dan dapat terlaporkan secara berkala melalui mekanisme pelaporan yang telah dibakukan di jajaran BKKBN, untuk mendukung pelaksanaan laporan khususnya di tingkat Kabupaten/ Kota yang saat ini peralatan pengolahan data dan informasi yang ada dalam kondisi yang kurang menguntungkan perlu mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk kelancaran proses komunikasi data hasil pelaksanaan Program KB Nasional.

Laporan hasil kegiatan Program KB Nasional mulai tahun 2009 telah dilakukan uji coba melalui jaringan yang berbasis teknologi informasi dengan hasil yang sangat memuaskan dengan arti dapat dilaksanakan oleh seluruh pengelola data dan informasi

pada setiap tingkatan wilayah, untuk melaksanakan penyajian data dan informasi dan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KB Nasional yang semula penyajian data dan informasi dilakukan secara manual mulai tahun 2009 dilakukan melalui sistem jaringan yang berbasis Teknologi Informasi, dengan diawali melalui uji coba jaringan yang dilakukan pada tahun 2008 di tingkat Provinsi.

Kondisi pelayanan data dan informasi melalui jaringan teknologi informasi yang ada saat ini masih sangat beragam dan sangat mempengaruhi kecepatan proses pengolahan data dan informasi sehingga diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana peralatan jaringan yang dapat menjangkau ke tingkat Kabupaten/ Kota, dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana khususnya di Kabupaten/ Kota tentunya akan memberikan kelancaran dalam proses penyediaan dan komunikasi data informasi.

Dokumentasi merupakan faktor pendukung dalam menentukan kondisi data infastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam Meningkatkan Sosialisasi KB. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dokumentasi yang mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN seperti alat dokumentasi dan proses evaluasi data dapat dikatakan sudah memadai namun masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Kekurangan tersebut terletak pada tempat penyimpanan dokumentasi. Seperti belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumentasi serta jumlah tempat penyimpanan dokumentasi seperti *locker* yang masih kurang sehingga data dari setiap Kecamatan atau

Kabupaten/Kota masih ada yang disatukan. Dokumentasi merupakan hal penting dalam upaya menyediakan data dan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat yang memerlukan informasi tentang KB.

4.1.3 Ketersediaan Data Yang Berkualitas Yang Mendukung Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana.

Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga, dalam menentukan apakah data tersebut berkualitas atau tidak maka dapat dilihat dari adanya data yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama di tingkat pusat, pada umumnya data bersumber dari laporan bulanan pengendalian lapangan program keluarga berencana nasional, laporan bulanan pelayanan kontrasepsi, hasil-hasil penelitia*/survei*, dan hasil-hasil rakernas serta sumber lain yang berkaitan pengendalian lapangan program keluarga berencana nasional, laporan bulanan pelayanan kontrasepsi, hasil-hasil penelitia/survei, dan hasil-hasil rakerda, serta sumber lain yang berkaitan dengan program KB.

Kedua di tingkat provinsi, pada umumnya data bersumber dari laporan bulanan pengendalian lapangan program keluarga berencana nasional, laporan bulanan pelayanan kontrasepsi, hasil-hasil penelitia/survei, dan hasil-hasil rakerda, serta sumber lain yang berkaitan.

Ketiga di tingkat kabupaten/kota, data bersumber dari laporan bulanan pengendalian lapangan program keluarga berencana nasional, laporan bulanan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ketersediaan data yang berkualitas yang mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam Meningkatkan Sosialisasi KB meliputi:

Pertama, adanya keakuratan data. Keakuratan data dibutuhkan sekali dalam informasi karena jika informasi tidak akurat maka informasi tersebut akan ditinggalkan karena tidak akan ada lagi yang mempercayai terhadap informasi tersebut. Proses untuk memperoleh data yang akurat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan hasil wawancara dalam penerapan *E-Government* di BKKBN cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat untuk dimasukan ke dalam SSIM-PKBN adalah dengan cara meminta langsung ke Kecamatan atau Kabupaten/Kota terkait sehubungan dengan informasi apa yang akan dimasukan ke dalam SSIM-PKBN. Informasi didalam SSIM-PKBN sudah akurat namun dalam prakteknya masih ada kendala yang dihadapi dalam meminta data secara langsung ke Kecamatan atau Kabupaten/Kota yang terkait. Kendala tersebut diantaranya para petugas yang ada di tingkat Kecamatan atau Kabupaten/Kota tidak cepat tanggap dengan seruan yang di lontarkan oleh BKKBN provinsi atau Pusat. Padahal data yang di perlukan sangat penting bagi Pemimpin untuk mengambil keputusan. Data yang harus di masukan ke dalam SSIM-PKBN yaitu data tentang hasil evaluasi di lapangan, mulai dari tinggkat desa hingga ke tingkat provinsi.

Kedua, adanya ketetapan waktu dalam memberikan data. Data yang diperlukan hendaknya diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketetapan waktu dalam memberikan data tersebut dimaksudkan agar infomasi dapat diberikan tepat waktu dan sesuai dengan situasi yang ada. Semakin cepat data tersebut diberikan maka semakin cepat informasi yang dibutuhkan dapat di peroleh oleh masyarakat yang memerlukan informasi tentang KB. Informasi tentang KB yang di butuhkan yaitu seperti misalnya informasi KB bagi remaja usia subur, ini di perlukan untuk dapat mengatasi hal-hal sebagai berikut:

a. Rata-rata usia kawin pertama remaja masih dibawah 20 tahun, padahal rata-rata usia kawin pertama wanita secara Nasional sudah 20 tahun.
b. Kelompok remaja usia 15–24 tahun telah melahirkan pada usia dibawah 20 tahun, hal ini mengandung resiko kesehatan reproduksi yang kurang baik salah satunya aborsi yang dapat menyebabkan resiko pada kematian bayi atau ibu.
c. Resiko TRIAD KRR (seksualitas, napza dan hiv-aids) pada remaja semakin meningkat, data HIV-AIDS pada usia produktif (15–49 tahun) cenderung meningkat demikian pula penderita narkoba pada usia remaja pun relatif meningkat terutama yang disebabkan oleh penggunaan jarum suntik.
d. Rata-rata usia sekolah rendah yaitu masih pada tingkat SD atau SLTP.
e. Kesempatan untuk bekerja semakin sempit dan persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
f. Kehidupan dan peran sosial yang semakin kompleks yang diakibatkan oleh akses informasi dan teknologi yang semakin canggih

i. Keberlangsungan PIK Remaja yang masih bergantung pada beberapa periode, sehingga perlu ditemukan pola pengkaderan yang dapat berlangsung lama.

(Sumber: Rakerda Tentang Perkembangan Program KB di Jawa Barat tahun 2006)

Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana, ketetapan waktu dalam memberikan data terkadang terhambat, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di Bidang IKAP BKKBN khususnya yang mengelola SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* masih kurang. Terkadang informasi yang di masukan ke dalam SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau informasi tersebut sudah lama dan belum diperbaharui. Selain itu kendala yang dihadapi sehubungan dengan ketepatan waktu dalam memberikan informasi adalah seringkali instansi yang ada tidak cepat tanggap dalam memberikan data kepada Bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam Meningkatkan Sosialisasi KB hal lain yang menjadi kendala adalah belum ada kesadaran yang tinggi dari setiap Kecamatan atau Kabupaten/Kota terkait sehubungan dengan ketepatan waktu dalam memberikan data. Kendala yang dihadapi tersebut dikarenakan terkadang Kecamatan atau Kabupaten/Kota belum memahami data apa saja yang diperlukan untuk dijadikan informasi ke dalam SSIM-PKBN sehingga Bidang IKAP harus menirimkan surat *Elektronik mail(e-mail)* berkali-kali.

Ketiga, adanya data yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam memberikan data hendaknya memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan data yang akan dimasukan ke dalam SSIM-PKBN. Sehingga tidak ada data yang direkayasa dan informasi tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah informasi data yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan karena informasi tersebut dibuat untuk orang banyak khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang memerlukan informasi tentang KB informasi tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Pendataan Keluarga Tahun 2008 Sosialisasi hasil pendataan keluarga dapat memberikan informasi tentang data keluarga dan sekaligus dapat di pergunakan oleh berbagai sektor pembangunan dalam melakukan *intervensi* program KB dan program pembangunan lainnya.
2. Operasional Pendataan Keluarga.

   Dukungan operasional pendataan keluarga diseluruh Desa/ Kelurahan agar dapat meningkatkan pendayagunaan data hasil pendataan keluarga disetiap tingkatan wilayah dan memantapkan komitmen politis dari setiap pimpinan wilayah dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga.
3. Pengolahan dan Rekapitulasi hasil Pendataan keluarga.

   Dilakukannya pengolahan hasil pendataan keluarga agar terdokumentasikannya hasil pendataan dalam bentuk rekapitulasi untuk disampaikan ke SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* BKKBN Pusat dan Lintas Sektor.
4. Operasional Pencatatan dan Pelaporan

Dukungan operasional bagi Para Pelaksana/ pengelola pencatatan dan pelaporan program KB agar lebih memahami maksud Pencatatan Program KB dan dapat melakukan analisa data sehingga data dan informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pengelolaan program KB disetiap tingkatan, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan.

5. Operasional Petugas RR Klinik

Dukungan dalam penguatan pencatatan dan pelaporan di KKB pada tahun 2009 telah dioperasional kepada para pengelola RR yang ada di klinik KB dengan tujuan Para Pelaksana Lebih Memahami dan trampil dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi di KKB.

(Sumber: Rakerda Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program KB Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2009)

Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKB dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBNdipusatkan di Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program (IKAP) BKKBN Provinsi Jawa Barat mesipun SSIM-PKBN ini sudah *Online* dalam *website* www.bkkbn.go.id akan tetapi di Pusatkan di Bidang IKAP. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang IKAP itu sendiri. Secara tidak langsung data dari setiap Kecamatan atau Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat sudah dimiliki oleh Bidang IKAP BKKBN sehingga Bidang IKAP tinggal mencari data apa saja yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa terdapat data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

Bidang IKAP BKKBN sebagai pengolah data menjadi informasi ke dalam SSIM-PKBN SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Keempat, adanya kelengkapan data yang dibutuhkan. Kelengkapan dalam memberikan data merupakan faktor penting dengan memberikan data yang lengkap maka informasi dapat diolah dengan baik dan diperoleh informasi yang lengkap juga. Berdasarkan hasil wawancara kelengkapan data dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN masih kurang karenakan sistem yang sedang di perbaiki. Data yang dibutuhkan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN belum dapat terpenuhi. Akibatnya masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut merasa Informasi yang ada dalam SSIM-PKBN belum lengkap dan perlu ditambahkan lagi karena sudah jadi bagian kegiatan BKKBN dalam mensosialisasikan KB.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan data yang berkualitas guna mendukung data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam upaya meningkatkan Sosialisasi KB belum sesuai dengan yang di rencanakan. Kendala yang dihadapi yaitu beberapa Kecamatan atau Kabupaten/Kota tidak cepat tanggap dalam memberikan data tentang KB. Secara *intern* Bidang IKAP menyadari bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola data menjadi informasi kedalam SSIM-PKBN menjadi faktor penghambat dalam memberikan informasi tentang KB yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4.1.4 Keamanan Data yang Diperoleh Yang Berhubungan Dengan Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Bagian Dari *Website www.bkkbn.go.id* Di BKKBN Provinsi Jawa Barat Galam meningkatkan Sosialisasi Tentang KB.

Keamanan data memang sangat dibutuhkan hal ini dikarenakan data tersebut menyangkut data yang sifatnya *eksternal*, dengan demikian diperlukan antisipasi untuk menjaga agar data tersebut aman, hal yang dilakukan biasanya dengan menyimpan rapi data tersebut ke dalam sebuah tempat yang dianggap aman seperti dalam sebuah arsip dan *backup CD*. Cara yang dilakukan dalam menjaga keamanan data dalam SSIM-PKBN. Sebagian besar data yang diperoleh dari Kecamatan atau Kabupaten/Kota yang ada di BKKBN sudah berupa data-data *elektronik* sehingga dapat disimpan ke dalam komputer.

Cara menjaga keamanan data tersebut maka dibuat sebuah *user name* dan *password* dalam komputer tersebut, hal ini dilakukan karena data yang ada dapat tersimpan dengan aman. Adapun *Password* tersebut hanya diketahui oleh pejabat dan aparatur terkait pelayanan informasi di Bidang IKAP BKKBN karena beliau yang secara penuh bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data yang ada. Perubahan *password* tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanan data yang ada di SSIM-PKBN di tangani langsung oleh Bidang IKAP yang mengetahui asal-usul data tersebut dari mana di dapatkan, dan Bidang IKAP tahu cara yang lebih tepat menyimpan data tersebut seperti di buat

dalam *compact disk* atau di *print* sebagai antisipasi terhadap hal yang tidak di inginkan.

Bentuk lain dalam menjaga keamanan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait yang berbentuk buku laporan ataupun dokumen-dokumen penting lainnya dilakukan dengan cara memasukannya ke dalam lemari. Sedangkan data dalam bentuk *compact disk* disimpan didalam sebuah tempat *compact disk* lalu disimpan ke dalam lemari yang ada khusus di meja Kepala Subbidang pelayanan informasi di Bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat. Upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan data yang diperoleh dalam mendukung penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam meningkatkan Sosialisasi tentang KB sudah cukup baik.

Berdasarkan uraian di atas, kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam meningkatkan Sosialisasi tentang KB belum memadai, hal ini disebabkan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan dan kurang tersedianya data yang berkualitas karena terhambat *updating* data dari intansi terkait, hal ini disebabkan beberapa instansi terkait masih belum menganggap penting untuk memberikan data kepada Bidang IKAP dalam membeikan informasi ke dalam SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi tentang KB cukup memadai serta memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai pusat layanan informasi secara cepat, dan akurat, namun belum dapat

terpenuhi secara optimal, hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan, sehingga belum adanya standarisari yang dijadikan pedoman dalam memberikan informasi yang baik ke dalam SSIM-PKBN. Penyusunan anggaran, belum adanya suatu lembaga yang profesional yang dapat mengelola baik secara teknis dan non teknis segala sesuatu mengenai SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id*. Kendala lain yang dihadapi adalah di BKKBN tidak memilikinya yang mengatur secara teknis tentang penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* untuk meningkatkan Sosialisasi tentang KB.

Kekurangan tempat dalam menyimpan dokumentasi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kekurangan tersebut terletak pada belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumentasi. Selain itu jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi. Kendala lain yang dihadapi adalah memberikan informasi adalah beberapa instansi masih belum memahami tentang SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*. Bahkan terkadang beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan kedalam SSIM-PKBN karena takut kerahasiaan dan instansi tersebut diketahui instansi lain.

Keamanan data yang di peroleh dari Kecamatan Kota/Kabupaten yang langsung di masukan ke SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* bisa dikatakan sudah aman terkecuali di dalam data tersebut ada virusnya yang bisa membuat data tersebut jadi berantakan hendaknya dalam masalah ini dapat di atasi dengan memakai anti virus yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjaga data tersebut. Antisipasi

perlu dilakukan agar segala sesuatu yang tidak di inginkan tidak terjadi. Berdasarkan penelitian di lapangan selain menggunakan fasalitas *Back up* data di Bidang IKAP juga mengantisipasinya dengan menyimpan data tersebut tidak di satu komputer saja yakni di beberapa komputer yang ada di Bidang IKAP BKKBN. Agar dalam mensosialisaikan KB kepada Masyarakat tidak terhalang oleh data yang hilang atau korup. Melihat kesigapan petugas di bidang IKAP untuk mengamankan data sudah cukup baik.

Keamanan data ini sangatlah penting untuk di perhatikan supaya petugas yang ada di bidang IKAP tidak bekerja berkalai-kali di karenakan data yang ada hilang atau rusak oleh virus. Komunikasi sangatlah penting disini agar selalu ada yang mengingatkan apabila terjadi kesalahan dan mengantisipasi hal yang tidak di inginkan. Sosialisasi KB tidak hanya di lakukan satu kali saja dan tidak satu tempat, BKKBN dalam satu bulan bisa mensosisasikan KB minimal empat kali, maka dari itu keamanan data yang ada sangat di perlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4.2 Ketersediaan Dasar Hukum Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Barat.

Dasar hukum merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah intansi baik di pemerintah maupun swasta karena dengan adanya dasar hukum orang akan mengetahui apa saja yang di larang dan apa sajakah yang di perbolehkan dan khusus

bagi intansi agar lebih mengetahui tupoksi dari masing-masing intansi. Dasar hukum tersebut sering dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam sebuah Intansi atau Organisasi, yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id untuk meningkatkan sosialisasi KB di BKKBN meliputi (1) adanya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (2) adanya berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Berdasarkan indikator tersebut maka dasar hukum dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN adalah

Pertama, adanya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mendasari penerapan *E-Government* melaui SSIM-PKBN. Undang-Undang digunakan sebagai landasan dalam proses sebuah dasar hukum, dengan adanya Undang-Undang tersebut maka kita dapat mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan perumusan sebuah keputusan yang akan di ambil oleh Pemimpin. Dasar hukum yang mendasari penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
2. Undang-undang No.52 tahun 2009. Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3. Keputusan Kepala BKKBN No. 159/HK-010/B5/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi Jawa Barat.

4. Keputusan Kepala BKKBN no. 182/HK-010/B5/2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja BKKBN Provinsi Jawa Barat
5. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 Pasal 43 Kepres 103/2001 tentang Kedudukan dan Fungsi BKKBN.
6. Ketetapan MPR NOMOR IV/MPR/1978 : Tentang pengendalian jumlah Penduduk
7. Ketetapan MPR NOMOR II/MPR/1983 : Tentang jumlah penduduk

   UU Nomor 22 tahun 1999, yakni tentang desentralisasi
8. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada pasal 43 Kepres 103/2001 Penyerahan urusan Kepada Daerah
9. Kepres No.9 tahun 2004 pasal 114 ayat (2) tentang kedudukan dan fungsi BKKBN Propinsi dan Kab/Kota Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informasi) di Indonesia

Bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknologi informasi mengacu pada dasar hukum yang telah di tetapkan oleh BKKBN pusat yaitu:

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional *Nomor : 70/Hk-010/B5/2001*, tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Dan Kabupaten / Kota.*

2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional *Nomor : 70/Hk-010/B5/2001*, tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Dan Kabupaten / Kota.*
3. *Bagian Keempat Pasal 47 :* Bidang IKAP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten / Kota.
4. *Bagian Keempat Pasal 48 :* Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang IKAP menyelenggarakan fungsi : (a) Pelaksanaan Pengolahan Data, Pengelolaan Teknologi dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi dibidang IKAP dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (b) Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Informasi Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (c) Pelaksanaan Pelaporan dan Pengelolaan Statistik dibidang Informasi Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. *Bagian Keempat Pasal 49 :* Bidang IKAP terdiri dari : (a) Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; (b) Seksi Analisis dan Evaluasi Program; (c) Seksi Pelaporan dan Statistik.
6. *Bagian Keempat Pasal 50 ayat (1)* : Seksi Pengolahan Data, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan

data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakulan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten / Kota.

(Sumber: Bidang IKAP BKKBN Jawa Barat tahun 2010)

Peraturan daerah khususnya yang menyangkut langsung dengan program KB akan lebih diperhatikan oleh BKKBN karena jadi acuan dalam menentukan tujuan yang ingin di capai oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat. Pemimpin BKKBN dalam hal ini Kepala BKKBN memerluakan sekali yang namanya dasar hukum karena dasar hukum yang menjadi dasar pemimpin dalam mengambil keputusan.

Kedua, adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan sebuah peraturan dari Pusat artinya sudah ada keputusan dari pusat untuk melaksanakan sebuah kegiatan di bidang KB. Berdasarkan peraturan Daerah tersebut maka segala keputusan yang telah ditetapkan harus segera dilaksanakan, adapun peraturan daerah tersebut bertujuan sebagai sebuah kekuatan dalam hukum.

Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* tersebut berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang pendayagunaan teknologi informasi SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Inpres tersebut maka pengelolaan SSIM-PKBN dilakukan oleh Bidang IKAP BKKBN berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui Surat Keputuan tersebut. Berdasarkan Peraturan-Peraturan tersebut

hanya bersifat umum. Artinya setiap Badan atau dinas juga wajib melakukannya tidak hanya BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian di BKKBN belum memiliki peraturan teknis yang mendasari penerapan *E-Government*. Peraturan teknis sangat diperlukan karena dengan adanya peraturan secara teknis tersebut, penerapan *E-Government* akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada adapun peraturan teknis tersebut diperlukan sebagai landasan kegiatan pengelolaan SSIM-PKBN sehari-hari seperti berbagai pelaksanaan yang harus dilakukan baik secara teknis maupun non teknis. Pembuatan peraturan teknis tersebut seharusnya dibuat oleh suatu lembaga yang sesuai dengan penerapan *E-Government*.

Meskipun otonomi daerah sudah berjalan lama namun BKKBN Provinsi Jawa Barat belum bisa membuat peraturan sendiri yang mendasari mengenai penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id untuk meningkatkan sosialisasi KB di Jawa Barat ini di karenakan BKKBN Provinsi Jawa Barat masih mengikuti peraturan dari BKKBN pusat baik itu peraturan teknis maupun non teknis dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN. Meskipun keadaannya seperti itu di harapkan tidak menjadi alasan bagi BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk tidak melaksanakan Pemerintah berbasis *elektronik* karena peraturan dari BKKBN pusat juga memberikan peraturan mengenai penerapan *E-Government* melaui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id tidak hanya ke Provinsi Jawa Barat saja yakni ke seluruh BKKBN yang ada di Indonesia mulai dari tingkat Desa, kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Kendala yang dihadapi misalnya belum adanya peraturan yang mengatur pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) yang seharusnya SSIM-PKBN tersebut dikelola oleh lembaga khusus yang menangani tentang *E-Government* itu sendiri seperti KPDE sangat penting keberadaanya karena lembaga tersebut mengelola tentang data-data elektronik. Penerapan *E-Government* memang memerlukan sebuah lembaga yang khusus untuk mengolah data. Adapun data dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN sebagian besar merupakan data elektronik. Pembentukan KPDE di BKKBN sangat dibutuhkan, adanya KPDE maka peraturan teknis dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN akan terbentuk dengan baik.

Dasar hukum dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN untuk meningkatkan sosialisasi tentang KB ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah namun masih mengikuti peraturan dari BKKBN pusat. Belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di Provinsi Jawa Barat. Sehingga dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN terkadang terhambat dikarenakan tidak adanya peraturan secara teknis yang seharusnya dibuat oleh suatu lembaga khusus yang sesuai dengan penerapan *E-Government* di BKKBN seperti KPDE.

Sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Jawa Barat yakni dengan memberikan Sanksi jika Petugas atau aparat BKKBN tidak memberikan

laporan mengenai hasil analisa yang di lakukan yang pertama jika dalam 3 (tiga) bulan tidak memberikan laporan maka yang bersangkutan akan di pidahkan kerjanya, yang kedua jika 3 (tiga) bulan selanjutnya tidak juga memberikan laporan maka kenaikan pangkatnya akan di tunda. Selanjutnya jika dalam 3 (tiga) bulan berikutnya tidak memberikan laporan juga maka yang bersangkutan di wajibkan membuat surat pengunduran diri dari Pegawai Negri Sipil (PNS). Penghargaan yang di berikan bagi pegawai yang disiplin waktu yakni kenaikan pangkat akan di percepat dan dapat bonus khusus dari pimpinan apabila disiplin dan berfrestasi.

4.3 Koordinasi Antar Instansi Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Program Keluarga Berencana .

Koordinasi antar instansi sangat diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang diinginkan dari instansi tersebut dan bagaimana instansi tersebut menanggapinya, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi antar instansi meliputi adanya koordinasi antar instansi, kerjasama dan komunikasi yang baik antar instansi dalam melakukan koordinasi di Bidang IKAP di BKKBN melalukan koordinasi dengan Seluruh BKKBN di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan SSIM-PKBN selain dibentuk agar lebih meningkatkan pelayanan informasi mengenai KB kepada masyarakat. SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* juga bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap aparaturnya itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut

maka dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu.

Pertama, adanya koordinasi antar instansi, dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi maka akan tercipta hubungan yang erat di setiap instansi, adapun dalam berkoordinasi hal yang disampaikan adalah bagaimana untuk mengoperasikan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* tersebut. Selain itu apa keunggulan SSIM-PKBN bagi instansi dan manfaat yang dapat diperoleh dari SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* tersebut dan keuntungan apa yang dapat di peroleh dari SSIM-PKBN tersebut.

Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai KB mengalami sedikit kendala. Faktor penyebabnya adalah belum adanya lembaga khusus yang menangani sosialiasi KB. Fungsi kelembagaan masih mengikuti arahan dari pusat, secara tidak langsung Bidang IKAP BKKBN tidak mempunyai kewenangan dalam proses penerapan *E-Government* itu sendiri, dengan demikian proses pemberian data jadi sedikit terhambat.

Kendala lainnya karena ada yang belum mengetahui untuk apa SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* tersebut dan apa hasil yang diperoleh dari SSIM-PKBN padahal SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* ini sangat berperan penting dalam sosialisasi tentang KB. Ketika Bidang IKAP ingin meminta data dari instansi terkait karena akan ditampilkan ke dalam SSIM-PKBN, Bidang IKAP memberikan penawaran terlebih dahulu artinya tidak memaksa, dengan

demikian jika instansi terkait bersedia untuk ditampilkan dalam SSIM-PKBN hendaknya sekaligus memberikan data yang dibutuhkan untuk ditampilkan ke dalam SSIM-PKBN.

Koordinasi antar instansi merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi data infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara maka koordinasi antar instansi dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN belum tercapai dengan maksimal hal tersebut dikarenakan Bidang IKAP tidak memiliki fungsi khusus dalam proses *E-Government* karena di bidang lain juga memiliki Komputer dan sama bisa mengolah data yang ada di SSIM-PKBN karena jaringan internet bisa di akses di BKKBN karena memiliki *wifi area* di BKKBN, selain itu masih kurangnya pemahaman tentang kegunaan SSIM-PKBN dalam *website* www.bkkbn.go.id itu sendiri bagi instansi. mengingat situasi yang ada di Provinsi Jawa Barat, koordinasi antar instansi belum optimal karena belum adanya kewenangan yang jelas bahwa Bidang IKAP sebagai kordinator.

Idealnya seperti di kabupaten/kota lainnya, koordinasi ini dilakukan oleh KPDE sebagai institusi yang memiliki kewenangan menerapkan *E-Government* di daerah. Kordinasi yang di lakukan BKKBN dengan intansi lain dalam rangka memepererat hubungan antar intansi maka BKKBN melakukan Koordinasi khususnya yang ada di Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

1. Isu Strategis
   a. Aksesibilitas para Stakeholder terhadap eksistensi Pos KB dan Sub. Pos KB rendah
   b. Pembinaan dari PLKB/ PKB terhadap Pos KB dan Sub Pos KB rendah.
   c. Kurangnya dukungan operasional bagi PLKB/ PKB dan Kader KB.

d. Kurangnya koordinasi, kemitraan dan integrasi Program di lini lapngan.
e. Kurangnya kompetensi petugas dalam pengelolan poktan.
f. Peran PLKB/ PKB dalam menjalankan 10 (sepuluh) langkah PLKB/ PKB lemah.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum :

Secara umum Program Institusi peran serta masyarakat bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kepedulian, kemitraan, integrasi program terhadap Program KB untuk mencapai sasaran Program KB Jawa Barat tahun 2010.

b. Tujuan Khusus :

a) Meningkatkan pemahaman visi, misi serta *grand strategi* Program KB Jawa Barat
b) Meningkatkan kinerja PLKB/ PKB dalam pengelolaan Program KB di tingkat Desa/ Kelurahan
c) Meningkatkan peran aktif institusi masyarakat dalam mendukung Program KB di lini lapangan
d) Meningkatkan integrasi Program di lapangan sebagai upaya penggarapan sasaran di lini lapangan

3. Strategi

a. Optimalisasi Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan.
b. Optimalisasi mekanisme Operasional di lini lapangan.
c. Penyiapan dukungan dan saran operasional.
d. Optimalisasi jejaring kemitraan mitra kerja.
e. Itensifikasi Program Institusi Masyarakat Pedesan melalui momentum (Bayangkara KB – Kes, TNI KB Terpadu, Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes).
f. Meningkatkan pemahaman Kader KB (Pos KB dan Sub.Pos KB) tentang 6 (enam) peran institusi

4. Pokok-pokok Kegiatan

a. Lomba Cerdas Cermat tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Lomba Cermat merupakan suatau kegiatan untuk meningkatkan kualitas kelompok kegiatan & dan kepedulian peran serta Kader dalam menunjang keberhasilan Program KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan dan dipadukan dengan seni tradisional ataupun yel-yel dari tiap peserta LCC.

b. Jambore Institusi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi

   Kegiatan Jambore institusi adalah satu upaya untuk menjalin koordinasi, kemitraan dan tukar pengalaman di lini lapangan antara para Kader KB, merupakan motivasi dalam kinerja mendukung Program KB

c. Momentum Bhakti Bayangkara KB – Kes

   Meningkatkan kepedulian dan kerjasama antara BKKBN dengan kegiatan Bhakti Bayangkara KB – Kes, melalui pelayanan KB dan pendukungnya.

d. Momentum TNI KB Terpadu

   Meningkatkan kepedulian dan kerjasama antara BKKBN dengan kegiatan TNI KB Terpadu, sebagai wujud nyata pengabdian TNI dalam mendukung Program Pembangunan, khusunya Program KB

e. Momentum Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes

   Terintegrasinya Program PKK – KB – Kesehatan dalam mencapai segmentasi sasaran, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya keluarga Sejahtera.

f. Pemilihan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Teladan

   Merupakan upaya untuk memotivasi,megukur kualitas IMP, PLKB/ PKB Teladan melalui Lomba, dan juga sebagai penghargaan bagi IMP dan PLKB/ PKB terbaik di Tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dilombakan lagi di tingkat Provinsi Jawa Barat

g. Pemilihan Pasangan KB Lestari Teladan (10 tahun, 15 tahun, 20 tahun)

   Kegiatan ini merupakan penghargaan kepada pasangan KB Lestari Teladan 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun, sebagai motivator dan teladan kepada masyarakat .

h. Konsolidasi DPP Forum Pos KB Jawa Barat dengan DPC Forum Pos KB Kabupaten/ Kota dan Pertemuan Pertemuan Pengurus Pos KB tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Sebagai upaya untuk pembinaan dan memantapkan koordinasi, kerjasama antara Pos KB dari Tingkat Provinsi sampai dengan Tingkat Kecamatan, serta mengeksiskan kembali 6 (enam) Peran Institusi dalam menjalankan Mekanisme Operasional di lapangan.

i. Konsolidasi IPeKB Jawa Barat dengan IPeKB kabupaten/ Kota

   Diharapkan tersusunnya Program PLKB/ PKB adalam menyikapi Nuansa Otonomi Daerah, sebagai landasan Program KB di lapangan melalui 10 (sepuluh) langkah PLKB/ PKB atau melalui Program yang dapat disesuaikan/ dijabarkan dengan kondisi masing-masing daerah.

j. Konsultasi Pengelola Institusi Masyarakat pedesan Jawa Barat dengan Institusi masyarakat Kabupaten/Kota

   Para pengelola IPS di Tingkat Kabupaten dan Kota adalah sebagai penguat Program dalam melaksanakan pembinaan, dan monitoring evaluasi Program KB melalui berbagai terobosan inovasi untuk menunjang Program KB

k. Pelatihan Program KB bagi PLKB/ PKB, Pos KB, Tenaga Pendamping Desa.

   Kegiatan ini terintegrasi dengan Balai Diklat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan institusi, PLKB/ PKB, Tenaga Pendamping Desa dalam menjalankan kinerjanya guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.

l. PPM Ista

   a) Terbentuk Kampung KB di tingkat Dusun/ RW pada 619 Kecamatan
   b) Terbentuk Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) di 26 Kab/ Kota
   c) Terbentuk DPP Forum Pos KB di 26 Kab/ Kota.
   d) Teregistrasinya Data Basis PLKB dan IMP pada 26 Kab/ Kota
   e) Pemanfaatan Media Komunikasi Khusus PLKB melalui forum Lip4

(Sumber: Rakerda Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat Tahun 2010)

Kedua, adanya kerjasama yang baik antar instansi. Kerjasama yang antar instansi diperlukan untuk lebih memudahkan dalam mencari data, selain itu dengan adanya kerjasama yang baik maka suasana kerja akan lebih baik. Kerjasama yang dilakukan oleh Bidang IKAP BKKBN lebih ke proses permintaan data, dalam mencari data yang diperlukan untuk SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*, Bidang IKAP secara langsung meminta data yang dibutuhkan dalam SSIM-PKBN. Terkadang kendala yang dihadapi karena instansi belum mengetahui data apa saja yang diperlukan untuk dijadikan informasi ke dalam SSIM-PKBN untuk meningkatkan sosialisasi KB kepada masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat, sehingga Bidang IKAP BKKBN meminta langsung data yang diperlukan kepada instansi terkait.

Kerjasama antar instansi belum dikatakan baik. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat sebagai pemberi informasi Bidang IKAP BKKBN belum mensosialisasikan Penerapan *E-Government* secara baik hal ini diketahui dengan masih adanya instansi yang belum mengetahui data apa saja yang harus diberikan instansi tersebut untuk diproses menjadi sebuah informasi ke dalam SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* bahkan ada aparatur yang tidak mengetahui sama sekali bahwa di BKKBN itu memiliki Program seperti SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* padahal sangat membantu dalam meningkatkan sosilisasi KB saat peneliti menanyakan tentang SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* aparat yang bertemu dengan penelit tidak mengetahu tentang SSIM-PKBN, sebagai contoh pejabat yang mengerti tentang komputer di Bidang IKAP hanya dua orang

dari 15 (lima belas) orang pegawai, dan yang lainnya tidak lebih hanya seorang pengguna aplikasi komputer.

Ketiga, adanya komunikasi yang baik antar instansi, dalam berkomunikasi diperlukan sebuah media. Media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, dengan adanya sebuah media maka komunikasi akan lebih baik, dalam menentukan media apa yang cocok untuk dipergunakan dalam berkomunikasi hendaknya dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan media tersebut sudah sering digunakan dalam berkomunikasi. Memperhatikan hal tersebut proses berkomunikasi akan mengalami hambatan sehingga tidak dapat menciptakan komunikasi yang baik antar instansi

Media yang digunakan dalam menciptakan komunikasi yang baik antar instansi misalnya media telepon, *faximile* dan media *elektronik* lainnya seperti jaringan komputer yang terhubung dari setiap Bidang yang ada di BKKBN yang dapat mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di Provinsi Jawa Barat. Media yang sering digunakan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* adalah telepon karena Media tersebut lebih cepat dan tepat untuk berkomunikasi. Pesan yang disampaikan melalui telepon tersebut biasanya berupa perintah atau hal-hal yang perlu secepatnya diproses dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih layanan situs jejaring sosial *Facebook* sekarang ini dapat dijadikan media dalam berkomunikasi karena di dalamnya kita bisa *Chating*. Supaya komunikasi lebih lancar dan keakraban dapat

tercipta antara intansi di BKKBN, dan paling sering melalui *website* yakni *www.bkkbn.go.id* dengan adanya komunikasi yang baik maka kerjasama antar instansi akan semakin baik, selain itu dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB terdapat media lain yang dapat digunakan dalam berkomunikasi yaitu dengan adanya jaringan komputer antar instansi.

Jaringan komputer tersebut di bangun selain dapat lebih mempermudah dalam memberikan data dari setiap instansi, jaringan komputer tersebut dapat digunakan untuk mengakses SSIM-PKBN melalui website *www.bkkbn.go.id* namun terdapat kendala yang dihadapi dalam melakukan komunikasi menggunakan jaringan komputer tersebut. Selain itu jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer dari setiap instansi masih terbatas, dengan demikian komunikasi terkadang terhambat dengan kendala tersebut. Keterbatasan jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer maka proses *updating* data sedikit terhambat karena di Bidang IKAP dari 15 (lima belas) orang yang bekerja hanya dua orang yang mengerti tentang komputer dan selebihnya hanya pengguna aplikasi dari komputer dan SSIM-PKBN itu sendiri.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka koordinasi antar instansi dalam penerapan *E-Government* sudah cukup baik, namun yang menjadi sebuah kendala adalah dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer. kendala tersebut disebabkan karena jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer dari setiap instansi masih terbatas. Selain itu tidak adanya petunjuk teknis dalam penggunaan jaringan komputer sehingga terkadang menyulitkan

aparatur itu sendiri. Kesigapan setiap intansi dalam mensosialisasikan KB sudah baik karena terjalin komunikasi yang baik antar intansi.

Pelaksanaan Program KB di Jawa Barat tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap II Program KB Jawa Barat tahun 2010-2014, diharapkan pelaksanaan program KB di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal untuk dalam mendukung program pembangunan pencapaian IPM Jawa Barat serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari hasil yang dicapai belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik *internal* maupun *external* dalam pengelolaan Program KB sampai tingkat lini lapangan, untuk itu maka dalam menghadapi tahun 2010 perlu adanya upaya–upaya yang jelas dalam pelaksanaan program KB nasional di semua tingkatan terutama lini lapangan tingkat kecamatan dan desa dengan memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

1. Memperkuat dan mengjurkan mekanisme operasional di semua tingkatan.
2. Meningkatkan kemampuan, sikap dan prilaku para pengelola program tingkat lini lapangan melalui pelatihan dan refreshing.
3. Memperjelas kembali peran dan fungsi pengelola KB tingkat lini lapangan.
4. Memperkuat komitmen pemerintah daerah agar mendukung terwujudnya jaminan pelayanan KB.
5. Optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan dukungan tenaga, sarana dan operasional program KB.

6. Memperkuat peran PLKB dan institusi masyarakat melalui kampung KB.

(Sumber: Rakerda Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat Tahun 2010)

4.4 Ketersediaan Aparatur Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Bagian di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana.

Ketersediaan aparatur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id sangat diperlukan karena dengan tersedianya aparatur yang mencukupi maka penerapan *E-Government* dapat berjalan dengan baik. Ketersediaan aparatur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN yang harus diperhatikan yaitu aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan yang menunjang, memiliki *skill* yang mendukung, adanya budaya berbagi informasi dan memiliki jumlah aparatur yang memadai. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ketersediaan aparatur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dapat dilihat dari:

Pertama, memiliki pengetahuan yang menunjang. Memiliki pengetahuan yang menunjang dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id saat ini sangat diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pengetahuan akan teknologi informasi sangat diperlukan dengan adanya (Inpres) No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Penerapan *E-Government* aparatur harus siap melaksanakannnya. Salah satu

cara untuk mengetahui pengetahuan aparatur adalah melalui tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pendidikan para pegawai yang khusus menangani dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di Bidang IKAP Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Tabel 4.2
Daftar pegawai Subbidang Pelayanan Informasi di Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program BKKBN Provinsi Jawa Barat.

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol. Ruang
1	Drs. Eli Kusnaeli, M.MPD	196110171986031002	IV/b
2	Edi Purnomo.S.PD	196309011984111001	III/c
3	Usep Koswara,SPD	195811261982031001	III/c
4	Rd Inne Suliawati kustyan, BSw	196005201986032003	III/c
5	Yeni Suwarni, BA	195807121982032002	III/c
6	Wowor lusje	195810231978102001	III/b
7	Nia Nurwulan	197905252003122010	II/d
8	DRA. Audry Adhisuria.MA	195802011985032001	IV/a
9	Leni Yuniawati	197106161995032002	II/d
10	DRS. Syarifudin	196104151985031002	III/d
11	DRA.Cucu Sumarni	195606051984032003	III/d
12	Tini Surtini	195708101982032003	III/b
13	I nyoman Widiarta, SE	197802112006041004	III/b
14	Enan Supriatna	196612011991031008	II/b
15	Dedi Komaruddin	195407041981031005	II/a

(Sumber.Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program Tahun 2010)

Jika dilihat dari faktor usia, yang lebih berperan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN adalah oleh aparatur yang berusia muda, hal ini disebabkan teknologi informasi sudah tidak asing lagi bagi aparatur tersebut sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website*

www.bkkbn.go.id, hal ini lebih kepada keterampilan dalam melakukan proses pengolahan data menjadi informasi ke dalam SSIM-PKBN mengenai KB.

Kemajuan teknologi informasi sudah tidak asing lagi bagi generasi muda sehingga tidak terlalu sulit dalam menggunakannya. Meningkatkan pengetahuan aparatur di Bidang IKAP BKKBN hal yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pendidikan lebih lanjut. Pendidikan tersebut bertujuan untuk menaikan pangkat golongan aparatur itu sendiri.

Apartur yang tidak terkalit langsung dalam penyelenggaraan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* lebih ikut berperan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan aparatur yang menunjang dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN sudah cukup memadai akan tetapi jika dilihat dari faktor usia dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN banyak dilakukan oleh generasi muda.

Strategi yang dilakukan oleh BKKBN dalam meningkatkan sumber daya yang manusia yang berkualitas yakni dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Prioritas sasaran pelatihan dan penelitian program KB nasional saat ini seluruhnya berfokus pada *grand strategi* program KB nasional dan mengacu pada Nilai Dasar Cerdas, Ulet dan kemitraan, sehingga Latbang sebagai *Servis Centre* harus mampu untuk menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan dari *Mission Centre* sebagai basis operasional pelaksanaan Program KB Nasional.

Penelitian dan Pelatihan yang dilaksanakan merupakan masukan-masukan dari *Mission Centre* dimana sasaran-sasaran pelatihan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup kompetensi manajerial dan teknis para petugas dan pengelolan program KB nasional sehingga dapat memberikan kontribusi positif kepada pengelolaan Program KB Nasional disetiap tingkatan. Tujuan yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam mensosialisasikan KB dengan cara memberikan pelatihan kepada aparatur yang ada di BKKBN dengan tujuan. Meningkatkan pengetahunan,Sikap dan kepedulian serta keterampilan petugas dan pengelola program KB disemua tingkatan, untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui Program KB Nasional Jawa Barat.

Strategi operasional yang ditetapkan sebagai berikut : *Pertama*, meningkatkan kompetensi manajerial, teknis dan profesionalisme SDM Diklat dan pengelolaan Program KB. *Kedua* meningkatkan manajemen Diklat berbasis IT. *Ketiga* meningkatkan kualitas kemitraan dalam penyelenggaraan diklat dengan Pemda Kab/Kota LSM, Orgaisasi Keagamaan, profesi, Swasta, Lembaga pendidikan formal dan lembaga diklat lainnya. *Keempat* membangun iklim kerja yang kondusif pada setiap unit kerja (Motivasi, kerjasama tim dan pemberdayaan) dengan *stakeholder* terkait. *Kelima* memfokuskan dan mengoptimalkan kemampuan tenaga potensial di desa). *Keenam* memfokuskan kinerja seluruh SDM pada sasaran. *Ketujah* mengoptimalkan kualitas pengendalian program KB pada masyarakat.

Sasaran yang ingin di capai dengan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut adalah meningkatkan kompetensi pengelola operasional program KB di Lini Lapangan dan Provinsi sebanyak 3.722 orang yang terdiri dari :

1. Tenaga Medis 390 orang
2. Petugas lapangan 120 orang
3. Toga/Toma 1440 orang
4. Kader 1500 orang
5. Pengelola Kab/Kota 120 orang
6. Pengelola Provinsi 102 orang

(Sumber: Bidang IKAP BKKBN Jawa Barat Tahun 2010)

Pelatihan-pelatihan diberikan kepada aparatur BKKBN guna mendukung dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2010. Pelatihan-pelatihan tersebut dikelompokkan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pengelola program KB sebagai berikut:

a. Diklat teknis
b. Pelatihan kewirausahaan
c. Diklat fungsional
d. Diklat bagi tenaga struktural studi kebijaksanaan

Selain kagiatan pendidikan dan pelatihan, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan diklat seperti :

a. Pengadaan buku-buku perpustakaan
b. Perumusan kurikulum Pelatihan Program KB
c. Need Assesment
d. Evaluasi/Review dan Pemantapan Peyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
e. Konsultasi balatbang ke Pusat
f. Konsultasi Diklat-diklat ke balatbang

g. Pembinaan Balatbang ke Diklat-diklat
h. Konsolidasi Bidang TK. Nasional
i. Capacity Building/Learning Organizatian
j. Strategi leadership
k. Evaluasi Pasca Pelatihan.

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Kedua, adanya *skill* (keterampilan) yang mendukung. Keterampilan dapat membantu dalam penerapan *E-Government* SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*. Keterampilan yang dimiliki aparatur saat ini khususnya dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* sudah cukup baik. Seiring kemajuan teknologi yang semakin hari semakin maju serta semakin beragam kemudahan yang diberikan maka hendaknya dilakukan pelatihan khusus tentang *E-Government* karena di Bidang IKAP hanya ada 2 (dua) orang yang mengerti mengenai komputer maka dengan adanya pelatihan khusus diharapkan dapat membantu mempermudah menerapkan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Cara yang dilakukan guna meningkatkan keterampilan yang mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* dengan melakukan pelatihan khusus dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN. Pelatihan tersebut bertujuan untuk lebih mengetahui keterampilan aparatur khususnya dalam SSIM-PKBN. Pelatihan yang dilakukan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN tersebut

lebih kepada pemasukan data kedalam SSIM-PKBN selain itu pelatihan tentang program-program yang diperlukan atau yang digunakan di dalam SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Berdasarkan hasil wawancara pelatihan yang diikuti oleh aparatur untuk meningkatkan keterampilannya adalah dengan mengikuti kursus tentang program-program yang mendukung penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN. Kegiatan lainnya dengan cara mengirimkan beberapa aparatur untuk melakukan pelatihan yang berhubungan dengan *IT* yang diselenggarakan oleh pihak BKKBN pusat, yang bertempat di Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelola data dan informasi program KB pada tahun 2009 dilaksanakan pertemuan regional di Bandung pada tanggal 11 Mei s.d 14 Mei 2009.

Berdasarkan pelatihan tersebut keterampilan aparatur tersebut jadi lebih meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa aparatur sekarang lebih cepat dan sikap dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* agar sosialisasi KB kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Secara *intern* pelatihan khusus dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dilakukan sehari setelah SSIM-PKBN tersebut pertama kalinya dioperasikan. Pelatihan ini di laksanakan berkelanjutan yakni di laksanakan 6 (enam) bulan sekali setiap tahunnya.

Ketiga, adanya budaya berbagi informasi. Budaya berbagi informasi dimaksudkan untuk lebih memperoleh data yang akurat, seperti halnya dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN budaya berbagi informasi yang

dilakukan tidak hanya dilakukan dalam ruangan rapat saja akan tetapi dilakukan dengan mengunakan sarana jaringan komputer yang telah disediakan, dengan mengunakan sarana jaringan komputer tersebut data dapat diperoleh dengan cepat.

Budaya berbagi informasi ini di laksanakan dari pusat hingga ke tingkat RT/RW di setiap Kabupaten/Kota dan kecamatan khusus untuk Provinsi Jawa Barat hampir setiap intansi di wajibkan memberikan informasi yang di perlukan. Setiap pegawai baik di tingkat provinsi maupun daerah di haruskan memiliki *e-mail* seperti yang sudah di tentukan oleh BKKBN pusat dan telah di beri tahu cara membuat *email* dan cara menggunakanya, dengan harapan koordinasi antar aparatur dapat berjalan dengan baik dengan adanya berbagi fasilitas yang diberikan. Agar pemberian informasi KB kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya koordinasi antara apartur dan informasi apa saja yang harus di berikan pada masyarkat mengenai KB. Khusus untuk KB di BKKBN ada istilah dengan kampung KB yaitu sebagai berikut:

1. Mengfokuskan penggarapan kegiatan operasional Program KB
2. Menyikapi nuansa otonomi daerah, untuk memudahkan pengelolaan Program KB secara terpusat
3. Mengintegrasikan Program KB dengan program pembangunan lainnya
4. Jumlah petugas lapangan KB (PLKB/PKB) tidak sesuai dengan wilayah garapan
5. Pembinaan poktan di lini lapangan lemah
6. SDM kader Pos KB dan Sub.Pos KB perlu ditingkatkan
7. Mekop program KB tidak kurang menjadi acuan program
8. Pemahaman materi subtansi program kurang dikuasai

9. KIE masih tidak sesuai dengan segmentasi sasaran

(Sumber: Rakerda Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga tahun 2008 BKKBN Jawa Barat)

BKKBN mempunyai wilayah yang ditargetkan sebagai wilayah sosialisasi KB. Daerah-daerah tersebut sering dikatakan sebagai Kampung KB. Kampung KB adalah Salah satu bentuk upaya program KB yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Kampung KB memiliki dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Daya ikat (sasaran datang)
2. Daya pikat (layanan sesuai poktan)

Kampung KB memiliki kriteria:

1. Pencapaian program KB 65%
2. Di tempat/ lokasi telah terbentuk :
   - Kelompok BKB
   - Sub.Pos KB
   - Posyandu

(Sumber: BKKBN Jawa Barat Tahun 2010)

Terdapat kendala dalam berbagi informasi dalam menggunakan jaringan komputer. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi tersebut lebih kepada sumber daya manusia. Masih kurangnya aparatur di setiap instansi yang mengetahui dan bisa mempergunakan jaringan komputer menjadi kendala utamanya makanya di lakukan Pendidikan danPelatian (diklat). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

mendukung kebijakan dan kegiatan Program KB Nasional di Jawa Barat dalam tahun 2009 berbagai tingkatan Diklat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pertemuan sesuai dengan mekanisme Kerja Balatbang dan Balai Diklat seperti Rapat Inti, Teknis Komponen, Rapat Perencanaan, Pertemuan Lintas Sektoral.
2. Melakukan pemasaran program pelatihan dan pengembangan melalui :
    a. Perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, pelatihan dan pengembangan yang tersedia seperti ruang kelas, ruang diskusi, ruang makan, ruang asrama, kamar mandi, sound system, komputer, LCD dan Laptop.
    b. Penyelenggaraan Diklat dan Penelitian yang bermitra dengan Pusat kajian dan Aparatur I LAN Bandung Lembaga Penelitian UNPAD, Dinas Kesehatan P2KS dsb.

    (Sumber: Rakerda Tahun 2009 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/pengelola untuk terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang handal, profesional dan mandiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang di adakan BKKBN. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diklat dapat dilihat dari pengalaman pengajaran tahun 2009 ternyata metoda pembelajaran interaktif sangat membantu dalam pemahaman materi diklat di setiap intansi. Dampaknya terlihat dari adanya peningkatan pemahanan 8 (delapan) peserta terhadap materi yang diberikan dengan nilai rata-rata 75 (tujuh puluh lima) Pada tahun 2009 telah terselenggaranya pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan di Balai Latihan dan

Pengembangan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Balai Diklat Bogor, Balai Diklat Garut dan Balai Diklat Cirebon. Materi dan tempat pelatihan diklat adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Teknik Umum Penyegaran dalam pengelolaan Program KB di tingkat Lini Lapangan bagi 120 orang pengelola Balatbang dan 3 Balai Diklat.
2) Pelatihan Dasar Umum Pengelolaan Program KB tingkat Lini Lapangan bagi 180 PLKB Baru terbagi menjadi (3 angkatan) di Balatbang (3 angkatan) di Bogor dan (2 angkata) di Garut.
3) Pelatihan Teknik khusus pemasangan MOP 60 orang, MOW 60 orang, dan IUD 90 orang, Implant 45 orang bagi Bidan/ Tenaga Medis (8 angkatan).
4) Kegiatan lain yaitu TOT Forum Pos KB 120 orang,TOT BKB 120 orang, TOT BKR 120 orang, TOT BKL 120 orang, TOT BLK 120 orang, JKK 30 orang, Mupen 60 orang, UPPKS, AKU, Toma/ Toga 60 orang, ABPK 120 orang, dan pelatihan KIE diikuti 30 orang peserta setiap angkatan.
5) Pelatihan Pendidikan berjenjang bagi 1 orang Pejabat Esselon III, 9 orang Calon Pejabat Esselon III dan 2 orang Pejabat Esselon IV

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Keempat, memiliki jumlah aparatur yang memadai. Ketersediaan jumlah aparatur dalam penerapan *E-Government* haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan. Memiliki jumlah aparatur yang cukup maka proses penyampaian informasi akan lebih cepat. Jumlah aparatur dalam penerapan *E-Government* di BKKBN khususnya di Bidang IKAP yang mengolah SSIM-PKBN 15 (lima belas) orang tapi yang mahir dengan komputer hanya dua orang. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah aparatur yang dimiliki Bidang IKAP BKKBN yang

mengerti tentang komputer. Terkadang informasi yang diberikan sedikit terhambat, hal ini disebabkan masih minimnya aparatur di Bidang IKAP yang memahami penerapan *E-Government.* Secara kelembagaan seharusnya BKKBN membuat lembaga khusus yang menangani penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*. di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB.

Berdasarkan pemaparan diatas maka ketersediaan aparatur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam mensosialisasikan KB belum mencukupi, hal ini disebabkan karena jumlah aparatur yang secara khusus mengelola SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN hanya berjumlah dua orang, dengan jumlah tersebut belum dapat mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah sarana teknologi yang mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Selain itu jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dalam berbagi informasi masih terbatas. BKKBN dalam hal ini meningkatkan sumber daya aparatur guna meningkatkan pengetahuan tentang penerapan *E-Government.* Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dilakukan dengan cara mengikutsertakan aparatur Bidang IKAP dalam diklat penerapan *E-Government*. Diklat-diklat yang diselenggarakan bagi aparatur sudah berjalan sangat baik. Diklat-diklat penerapan *E-Government* yang berhubungan dengan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam meningkatkan sosilalisasi KB

sudah cukup baik karena di lakukan dengan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

4.5 Ketersediaan Sarana Teknologi Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meningkatkan Sosialisasi Keluarga Berencana Di provinsi Jawa Barat.

Sarana teknologi merupakan faktor utama untuk menentukan apakah sarana yang dimiliki tersebut memadai atau tidak dan bagaimana kemudahan yang diberikan dalam mengaksesnya, hal lain yang dapat mendukung sarana teknologi tersebut adalah jaringan komputer dan komputer beserta *sofwarenya.*

Pertama, jaringan komputer sarana teknologi merupakan hal yang penting dalam teknologi informasi dengan memiliki sarana teknologi yang memadai maka informasi dapat lebih cepat dan beragam untuk diberikan. Selain itu dengan adanya sarana teknologi yang memadai maka akan semakin mudah untuk mengaksesnya. Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN, kemudahan dalam mengakses yang diberikan adalah dengan cara membuat jaringan komputer yang dihubungkan dengan seluruh bagian (*server)* yang ada di BKKBN, dengan adanya jaringan tersebut maka lebih memudahkan dalam melakukan pertukaran data dan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Jumlah sarana teknologi yang khusus digunakan untuk SSIM-PKBN berjumlah 83 (delapan puluh tiga) unit komputer dengan jaringan *LAN dan wifi.* Jaringan

tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengakses dan lebih memudahkan dalam pertukaran data antar instansi di BKKBN, untuk jaringan *wifi* dapat digunakan di sekitar lingkungan kantor BKKBN. Sedangkan jaringan *LAN* dihubungkan ke semua komputer yang ada di setiap bidang yang ada di BKKBN. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami karena dengan membangun fasilitas jaringan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dan aparaturnya tentang iformasi KB. BKKBN juga memiiki *website* yakni *www.bkkbn.go.id* yang berisi informasi khususnya tentang informasi KB yang ada di Jawa Barat yang dapat di akses oleh aparatur itu sendiri dan juga bisa di akses oleh publik/masyarakat.

Kedua, komputer beserta *softwar*enya, dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB terdapat sarana teknologi yang mendukung diantaranya dengan memiliki 83 (delapan puluh tiga) unit komputer yang ada di seluruh bidang yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kualitas sarana teknologi tersebut sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN untuk mensosilisasikan KB kepada masyarakat terdapat sarana teknologi yang mendukung diantaranya dengan memiliki 83 (delapan puluh tiga) komputer yang ada di seluruh bidang yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Masalah yang sedang di hadapi adalah belum adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi hambatan dalam ketersediaan sarana teknologi bukan berdasarkan kurangnya sarana tersebut

melainkan sarana yang tersedia tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena kerusakan-kerusakan, adapun pengadaan program-program yang mendukung penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN, masih bergantungnya pada BKKBN pusat maka BKKBN Jawa Barat tidak melakukan perubahan yang signifikan, dan kriteria program yang di berikan pusat pada daerah salah satu kriteria tersebut adalah bagaimana membuat sebuah program-program tersebut agar lebih menarik, namun yang lebih penting adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengakses informasi tentang KB melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Revitalisasi pengendalian pelaksanaan sistem informasi manajemen program KB, lebih diarahkan pada bagaimana data dan informasi dapat memberikan kontribusi terhadap manajemen pelaksanaan program KB setiap saat dengan merevitalisasi kembali kegiatan forum-forum rapat pimpinan, rapat pengendalian program serta rapat pengendalian proyek, rapat koordinasi, staf meeting di berbagai tingkatan wilayah operasional berbasis data dan informasi yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Strategi Operasional yang di rancang oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat meliputi:

a. Optimalisasikan mekanisme operasional lini lapangan disetiap tingkatan.
b. Peningkatan peran institusi masyarakat dalam penyediaan data dan informasi program KB.

c. Pengembangan cakupan data dan informasi hasil pelayanan KB di tempat-tempat pelayanan KB jalur pemerintah, Swasta dan lembaga lainnya.

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia data dan informasi program KB disetiap tingkatan wilayah.

e. Peningkatan pemanfaatan pengolahan data dan informasi melalui fasilitas teknologi informasi berbasis *web on line*.

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Sistem aplikasi yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam menunjang peningkatan sosialisasi KB pada masyarakat di provinsi Jawa barat meliputi:

1) Sistem Aplikasi Laporan Bulanan Klinik KB/ Statistik Rutin KKB
2) Sistem Aplikasi Laporan bulanan Pengendalian Lapangan Program KB
3) Sistem aplikasi Laporan Bulanan Logistik
4) Sistem Aplikasi Laporan Bulanan Keuangan
5) Sistem Aplikasi Database UPPKS
6) Sistem Aplikasi Database Tribina Keluarga
7) Sistem Aplikasi Database IMP dan PLKB
8) Sistem Aplikasi Database PIK Remaja
9) Sistem Aplikasi Database Pustaka On Line
10) Penyebarluasan Informasi Melalui situs web BKKBN Jawa Barat

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Program kegiatan yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sosialisasi KB di Jawa Barat memiliki kegiatan yang berkesinambungan meliputi:

a. Penyediaan data dan informasi program KB-KS (Data dan informasi pengendalian lapangan, pelayanan kontrasepsi dan data mikro keluarga) bulanan, triwulanan dan tahunan.
b. Pengolahan data dan informasi, serta dokumentasi melalui teknologi informasi berbasis *Website (online).*
c. Menyiapkan data dan informasi hasil-hasil analisis dan evaluasi program
d. Penyediaan sarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi manajemen program KB.
e. Membangun insfrastruktur jaringan dan sarana teknologi informasi dan komunikasi

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Pokok–pokok kegiatan yang di lakukan BKKBN dalam menyediakan data dan informasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan KB pada masyarakat meliputi:

a. Pengolahan Data, Penyebarluasan Informasi, dan Dokumentasi melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

1. Penyusunan Umpan Balik

Perkembangan informasi yang diketahui dalam proses pencapaian Program KBN dapat dijadikan bahan dalam menyusun keputusan, kebijakan perencanaan dan strategi operasional setiap bulan.

2. Penyusunan Monografi

   Tersedianya data dan informasi hasil pelaksanaan Program KB Nasional di Jawa Barat.

3. Pengembangan Sistem Data dan Program Aplikasi

   Tersedianya program aplikasi yang dapat mengkonversikan sistem aplikasi SIDUGA yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* dalam rangka membentuk Bank Data terpadu dengan berbasis *SQL Server Engine dengan lisensi Microsoft.*

4. Evaluasi Hasil kinerja BKKBN Tahun 2009

   Tersusunnya suatu rumusan dan kesimpulan dari hasil input, proses dan output bagi terwujudnya keserasian kebijaksanaan pelaksanaan kependudukan dan Program KB Nasional.

5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan SPM KB-KS yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pemda Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan Program KB Nasional di era desentralisasi.

6. Penilaian Dampak Pengelolaan Program KB

   Terukurnya efek dan dampak program antara lain: Tingkat kelangsungan perkawinan; Tingkat kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi; Tingkat Usia

Perkawinan; Tingkat Kelahiran; Tingkat Kesejahteraan Keluarga; Ratio Jenis Kelamin; Tingkat Kesertaan Ber KB; Crude Birt Rate (CBR); Total Fertility Rate (TFR); Chilld Women Ratio (CWR); Gross Reproduction Rate (GRR); General Fertility Rate (GFR); Age Specific Fertility Rate (ASFR); Total Fertility Rate (TFR) dan Net Reproduction Rate (NRR) serta Infant Mortality Rate (IMR).

7. Penyusunan Evaluasi Hasil Kinerja BKKBN tahun 2010

   Hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama satu tahun dievaluasi sebagai pertanggung jawaban yang disampaikan secara kelembagaan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kajian kependudukan dan KB hasil Survei

   Melakukan analisis terhadap pencapain dan dampak program KB berdasarkan hasil survei lintas sektor (BPS) terutama yang berhubungan dengan *fertilitas* dengan demikian diperolehnya gambaran tentang kependudukan di Jawa Barat khususnya dengan segala permasalahannya, keberhasilan program KB Nasional dan tersusunnya suatu rumusan dan kesimpulan dari hasil input, proses dan output bagi terwujudnya keserasian kebijaksanaan pelaksanaan kependudukan dan Program KB Nasional.

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat programnya saja yang mendukung dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website*

www.bkkbn.go.id dalam mensosilisasikan KB sebesar lima puluh juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk biaya dalam pembelian alat serta transportasi, jadi biaya awal yang diperlukan untuk SSIM-PKBN sebesar lima ratus juta rupiah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana teknologi dalam penerapan *E–Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN sudah memadai dan layak untuk dipergunakan, namun yang menjadi kendala adalah sarana yang telah ada terkadang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan tidak adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi itu sendiri dan kekurangan sumber daya manusia yang menggunakannya. Selain itu, jumlah komputer yang telah ada seperti spesifikasi dan *software-softwarenya* perlu ditingkatkan agar dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN lebih baik lagi.

4.6 Strategi Pemikiran Pemimpin Dalam Penerapan *E-Government* Melalui SSIM-PKBN Di BKKBN Dalam Meeningkatlkan Sosialisasi Keluarga Berencana .

Strategi pemikiran pemimpin sangat diperlukan dalam mendukung penerapan *E-Government* dengan adanya strategi tersebut maka akan diketahui seberapa besar pemimpin tersebut mempunyai keinginan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam mensosialisasikan KB di Provinsi Jawa Barat. Strategi pemikiran pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dapat dilihat melalui visi,

dan *grand strategi* yang dimiliki. Kesadaran yang tinggi serta pengetahuan yang luas dan Pemimpin yang memiliki keterampilan yang mendukung juga memiliki komitmen yang kuat.

Kepala BKKBN dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan sejalan dengan upaya revitalisasi program KB, saat ini telah dirumuskan Visi, Misi, dan Strategi Dasar *(grand strategi)* program KB yang baru. Formulasi arah kebijakan program ke depan ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang melemah pasca desentralisasi. Visi, Misi, dan Strategi Dasar program KB yang baru ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK-010/B5/2007, merupakan arah, acuan, dan rujukan bagi petugas BKKBN maupun pengelola program lainnya dalam menetapkan kebijakan program KB nasional.

Ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan seluruh potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya, dana, sarana, maupun kemampuan manajemen yang dapat mengarahkan segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien, untuk itu mutlak diperlukan dukungan maksimal dari unsur-unsur penunjang yang salah satu diantaranya adalah kegiatan analisis dan evaluasi program.

Sebagai salah satu bagian *integral* manajemen program KB nasional, kegiatan analisis dan evaluasi program merupakan bagian dari program KB nasional. Analisis dan penilaian operasional selalu berusaha menyajikan informasi terpilih secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan tuntutan perkembangan program KB yang ada di

BKKBN. Program KB tersebut mengidentifikasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi, serta memberikan masukan untuk solusi dan pemecahannya. Penerapan cara tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis dan penilaian operasional program yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan program keluarga berencana nasional dapat terus diikuti, maka sub-sistem analisis dan penilaian operasional sebagai bagian manajemen program keluarga berencana nasional harus dapat menampung adanya perubahan dan perkembangan program tersebut. Berkaitan dengan itu maka perlu dilakukan berbagai penyesuaian terhadap sub-sistem analisis dan penilaian operasional program keluarga berencana nasional. Program ini dimaksudkan agar searah dengan visi dan misi program KB yang baru, sehingga dapat dipergunakan untuk menganalisis tingkat perkembangan pengelolaan program, khususnya dari segi operasional program KB yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Analisis dan penilaiannya perlu dilakukan melalui suatu cara atau metode analisis dan penilaian yang ditekankan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional program KB di lapangan. Kegiatan lainnya dengan cara penyesuaian terhadap sub-sistem analisis dan penilaian operasional program keluarga berencana nasional juga dilakukan karena sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN yang menjadi sumber data kegiatan analisis dan evaluasi program mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui strategi pemikiran pemimpin

dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, pemimpin yang memiliki visi yang jelas. Memiliki visi dalam sebuah pembangunan sangat diperlukan karena dengan adanya visi tersebut kita dapat mengetahui apa yang diinginkan dalam pembangunan tersebut. Visi yang dimiliki oleh Kepala BKKBN dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berbasis *elektronik* sebagai pusat informasi tentang KB di BKKBN Jawa Barat dalam satu alat yaitu SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Berdasarkan hasil penelitian visi Kepala Subbidang Pelayanan Informasi di Bidang IKAP BKKBN adalah ingin meningkatakan pelayanan informasi yang cepat, tepat serta akurat serta penerapan disiplin kerja dan disiplin waktu. Berdasaarkan hal tersebut pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN sudah memiliki visi untuk menigkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat dan ingin memiliki pegawai yang disiplin.

Kedua, pemimpin yang memiliki *grand strategi* yang jelas. *Grand strategi* sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan yaitu diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan. Adapun Grand strategi yang dimiliki pemimpin adalah:

1. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB
2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB

3. Memperkuat SDM Operasional Program KB
4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB
5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Berdasarkan hal tersebut maka strategi pemikiran pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id di BKKBN untuk meningkatkan sosialisasi KB di Provinsi Jawa Barat sudah dapat direalisasikan dengan baik. Realisasi penerapan *E-Government* merupakan wujud dari *Good-Government.* Pelaksanaan hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemimpin telah melakukan pendekatan yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan cara sering melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi tersebut dilaksanakan ketika pegawai mengikuti apel pagi setiap hari kerja. Artinya secara langsung Kepala Subbidang Pelayanan Informasi di Bidang IKAP BKKBN memberikan pelatihan dasar tentang penerapan *E-Government* yang sudah menjadi kebutuhan dan disiplin kerja sangat di perlukan di sebuah organisasi termasuk BKKBN.

Pendekatan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala Bidang IKAP dengan cara menggunakan fasilitas lain seperti jaringan komputer yang telah disediakan, dengan adanya jaringan diharapkan akan dapat menimbulkan rasa ingin

tahu dari aparatur BKKBN untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang sosialisasi KB melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*.

Berdasarkan uraian di atas yang dilakukan oleh Kepala Bidang IKAP BKKBN dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan penerapan *E-Government* adalah dengan melakukan survei langsung ke lapangan mengenai hal apa saja yang menjadi masalah yang dihadapi dalam mensosialisasikan KB yang dilakukan oleh petugas PLKB dilapangan. Penerapan *E-Government* dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemimpin apabila sering melakukan diskusi dan rapat kerja dilakukan setiap hari tentang permasalahan yang menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diskusi tersebut dilakukan setiap hari, karena dalam SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* terdapat informasi yang perlu dirubah setiap hari.

Ketiga, pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, dengan adanya kesadaran yang tinggi maka akan mencerminkan pemimpin yang baik juga. Berdasarkan hal ini kesadaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN adalah Kepala Bidang IKAP BKKBN sadar akan pentingnya penerapan *E-Government*, adapun salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi, selain itu mensosialisasikan kepada seluruh aparatur bahwa SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* tersebut merupakan suatu media yang memberikan informasi yang akurat baik bagi aparatur maupun bagi

masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang memerlukan informasi tentang KB umumnya iklim kerja yang ada di Bidang IKAP cukup kondusif dan kompak karena antar personal memiliki solidaritas yang kuat.

Keempat, pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya, hal ini dimaksudkan agar aparatur yang ada di BKKBN tidak meremehkan atasannya. Penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN pengetahuan seorang pemimpin dalam penerapan *E-Government* sangat luas dan lebih dari cukup, hal ini dapat dilihat melalui latar belakang pendidikan Kepala Subbidang Pelayanan Informasi di Bidang IKAP BKKBN tersebut yang secara garis besar sudah tidak asing lagi mengenai teknologi informasi, dengan demikian pemimpin tersebut sudah mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan *E-Government* khususnya SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat dan di Bidang IKAP mulai dari kepala sampai bawahan semuanya harus mampu menggunakan aplikasi komputer .

Kelima, pemimpin yang memiliki *skill* yang cukup baik, hal tersebut sangat diperlukan dalam menentukan suatu keputusan artinya jika pemimpin tersebut memiliki keterampilan yang cukup baik maka pemimpin tersebut akan mengetahui hal apa yang perlu diperhatikan dalam memerintahkan tugas kepada bawahannya. Pemikiran pemimpin tentang sosialisasi KB yang di cetuskan oleh pemimpin dapat di laksanakan dengan baik. Selain itu pemimpin tersebut memiliki keterampilan yang cukup dalam penerapan *E-Government* maka akan lebih baik dalam membuat

keputusan yang akan diambilnya. Pemimpin yang memiliki *skil* yang ada di BKKBN yaitu *skil* dalam melaksanakan program KB pada masyarakat yang meliputi:

Penyediaan Data dan Informasi tentang KB yang ada di Jawa Barat

1. Optimalisasi peningkatan cakupan laporan hasil pelayanan KB–KS yang akurat dan tepat waktu.
2. Pengolahan data dan informasi melalui teknologi informasi.
3. Pengembangan dan pendayagunaan hasil evaluasi dan analisa program.
4. Pendayagunaan hasil pendataan keluarga.
5. Revitalisasi pengendalian pelaksanaan sistem informasi manajemen program KB.

Kegiatan penyiapan sumber daya manusia dalam mensosialisasikan KB pada masyarakat di Jawa Barat:

1. Pelatihan Teknik Umum Penyegaran dalam pengelolaan Program KB di tingkat Lini Lapangan.
2. Pelatihan Dasar Umum Pengelolaan Program KB tingkat Lini Lapangan.
3. Pelatihan Teknik khusus pemasangan.
4. Kegiatan lain yaitu TOT Forum Pos KB.
5. Pelatihan Pendidikan berjenjang bagi Pejabat Esselon III, Pejabat Esselon IV

(Sumber: Rakerda Tahun 2010 Tentang Rencana Pelaksanaan Program KB Nasional Di Jawa Barat)

Berdasarkan hal tersebut keterampilan seorang Kepala di Bidang IKAP BKKBN dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN untuk mensosialisasikan KB cukup baik hal itu dapat dilihat hasil karya yang dbuatnya. Pemimpin tersebut berlatar belakang pendidikan dalam bidang *IT* dengan begitu beliau sangat mengetahui tentang apa saja yang harus di perhatikan dalam SSIM-PKBNdi Bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat. Keterampilan yang dimiliki

oleh pemimpin tersebut dapat berguna bagi penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* www.bkkbn.go.id di Provinsi Jawa Barat dan menjadi pelajaran bagi bawahannya.

Keenam, pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat. Seorang pemimpin haruslah mempunyai komitmen yang kuat hal tersebut dilakukan agar dapat diikuti oleh bawahannya. Komitmen yang ditunjukan oleh Kepala Bidang IKAP BKKBN Provinsi Jawa Barat, selalu menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan penerapan *E-Government*. Selain itu pemimpin tersebut selalu mengirimkan bawahannya untuk melakukan pelatihan berdasarkan hal tersebut maka Kepala Bidang IKAP BKKBN memiliki komitmen yang kuat mengenai penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosilaisasi kepada masyarakat karena ingin mencapai idikator kinerja yang di tentukan oleh BKKBN pusat.

Komitmen yang di inginkan oleh kepala BKKBN yaitu sebagai berikut:

a. Penyampaian informasi dan komitmen pelayanan KB bagi Keluarga miskin.
b. Pelayanan KB melalui momentum Bhakti IBI, TMKK, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes, Harganas dan momentum strategis lainnya.
c. Bhakti IBI KB – Kesehatan.
d. Operasionalisasi Mobil Unit Pelayanan KB Keliling.
e. Pelayanan KB bagi PP dan PK di 55 Rumah Sakit/ RSB
f. Pelayanan Bhaksos dalam Kegiatan Momentum

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan

(Sumber: Rakerda Tahun 2008 Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Di BKKBN Jawa Barat)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa strategi pemikiran seorang pemimpin dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN cukup memadai dengan memiliki visi yang jelas yaitu ingin lebih meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat, dengan melakukan pendekatan sosialisasi yang merupakan sebuah strategi dalam menerapkan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Kesadaran yang dimiliki pemimpin tersebut adalah dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu dengan berlatar belakang pendidikan dalam bidang *IT*, kepala Bidang IKAP BKKBN maka dalam membuat keputusan akan lebih mengerti keputusan apa yang harus diambil dalam keadaan tertentu. Pemimpin memiliki komitmen dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dilakukan dengan menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan penerapan *E-Government* dan megirimkan beberapa aparatur untuk melakukan pelatihan.

Analisa penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam meningkatkan sosilaisasi KB dapat disimpulkan bahwa kondisi data infrastruktur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* belum dapat

terpenuhi secara optimal, karena tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan, sehingga belum adanya standarisari dalam ketetapan prosedur kegiatan.

Perubahan yang paling mendasar adalah berubahnya sistem pembangunan dari yang bernuansa *sentralistik* menjadi *desentralistik*. Pada saat era Orde Baru memegang kekuasaan, peran pemerintah pusat menjadi sangat menentukan di seluruh sektor pembangunan, akan tetapi pada era desentralisasi saat ini peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat dominan. Tujuan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosilaisasi KB di BKKBN sangat jelas yaitu sebagai pusat layanan informasi secara cepat, dan akurat tentang informasi KB yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Tidak adanya suatu lembaga yang profesional yang dapat mengelola baik secara teknis dan non teknis segala sesuatu mengenai SSIM-PKBN dan penyusunan anggaran masih di pegang oleh BKKBN pusat. Belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumentasi menjadi suatu kendala yang dihadapi. Selain itu jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi.

Terkadang beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan ke dalam SSIM-PKBN karena takut kerahasiaan data instansi tersebut diketahui instansi lain. Fasilitas yang telah tersedia ini memang pada saat ini masih banyak dimanfaatkan oleh para petugas di tingkat provinsi sehingga dalam penyajiannya belum banyak memberikan

kontribusi terhadap promosi kegiatan sosialisasi KB yang dilakukan oleh setiap daerah baik tingkat kecamatan, desa maupun masyarakat luas.

Peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam meningkatkan sosilaisasi KB belum tersedia, tetapi dasar hukum dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN sudah ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi antar instansi dalam penerapan *E-Governemnt* sudah cukup baik, hal tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta kerjasama kuat antar instansi. Dasar hukum tersebut sering dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam sebuah Intansi atau organisasi, yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan Sosialisasi KB di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Koordinasi antar instansi sangat diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang diinginkan dari instansi tersebut dan bagaimana instansi tersebut menanggapinya. Koordinasi antar instansi meliputi adanya koordinasi antar instansi, kerjasama dan komunikasi yang baik antar instansi dalam melakukan koordinasi di Bidang IKAP di BKKBN melalukan koordinasi dengan Seluruh BKKBN di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* dibentuk agar lebih meningkatkan pelayanan informasi mengenai KB kepada masyarakat.

Jumlah aparatur dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN belum cukup memadai hal ini

dikarenakan jumlah aparatur yang ada di Bidang IKAP BKKBN yang Khusus mengelola SSIM-PKBN tidak menegrti semua tentang Komputer hanya ada dua orang yang mahir menggunakannya selebihnya hanya pengguna aplikasi. Salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan aparatur adalah dengan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan penerapan *E-Government*.

Strategi yang di lakukan oleh BKKBN dalam meningkatkan sumber daya yang manusia yang berkualitas yakni dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Prioritas sasaran pelatihan dan penelitian program KB nasional saat ini seluruhnya berfokus pada *grand strategi* program KB nasional dan mengacu pada Nilai Dasar Cerdas, Ulet dan kemitraan, sehingga Latbang sebagai Servis Centre harus mampu untuk menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan dari *Mission Centre* sebagai basis operasional pelaksanaan program KB nasional. Penelitian dan Pelatihan yang dilaksanakan merupakan masukan-masukan dari *Missian Centre* dimana sasaran-sasaran pelatihan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup kompetensi managerial dan teknis para petugas dan pengelolan program KB nasional sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan Program KB Nasional disetiap tingkatan wilayah yang ada di Jawa Barat.

Sarana teknologi dalam penerapan *E–Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN dalam meningkatkan sosilaisasi KB sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Terkadang sarana yang telah ada tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Salah salah satu penyebabnya karena aparatur tersebut hanya bisa mengunakan sarana tersebut. Sedangkan dalam pemeliharaannya

aparatur tidak dapat menjaga sarana teknologi tersebut, hal ini disebabkan sebagian besar aparatur hanya bisa menggunakannya saja tanpa bisa merawatnya, dalam memenuhi kebutuhan program KB.

Penerapan *E–Government* melalui SSIM-PKBN memerlukan anggaran BKKBN Jawa Barat tahun 2009 adalah sebesar Rp. 56 milyar, apabila di bandingakn dengan BKKBN Jawa Tengah dan Jawa Timur, anggaran mereka berkisar sekitar Rp.71 milyar. Anggaran BKKBN Jawa Barat yang bersumber dari APBN dan jumlahnya sangat terbatas ini, sebagian besar di distribusikan kembali ke seluruh kabupaten/kota di Jawa barat. Landasan Hukum pelaksanaan anggaran tahun 2009 mengacu pada ketentuan UU RI No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara serta peraturan menteri keuangan RI No 134/ PMK.06/ 2005 tahun 2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

Strategi pemikiran seorang pemimpin diwujudkan dengan memiliki visi yang jelas yaitu keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat, dengan melakukan pendekatan sosialisasi yang merupakan sebuah strategi dalam menerapkan *E-Government* melalui SSIM-PKBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id*, adapun kesadaran yang dimiliki pemimpin tersebut adalah dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi.

Pemimpin BKKBN Jawa Barat menunjukan komitmen yang kuat dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosilaisasi KB dilakukan dengan cara mendelegasikan aparaturnya untuk melakukan pelatihan yang

berhubungan dengan penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN dalam meningkatkan sosialisasi KB kepada Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan oleh pemimpin BKKBN.